

JARINGAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN ILEGAL INDONESIA KONSTRUKSI BANGUNAN DI MALAYSIA

Received: 13-03-2025 Revised : 09-04-2025 Accepted : 16-06-2025

Randi¹, Muhamad Fadhil Nurdin², Bintarsih Sekarningrum³, Rini Agustina⁴

¹Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

²Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

³Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

⁴Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9, Kementerian Agama, Muara Enim

randi@fisip.unsri.ac.id

ABSTRAK

Besarnya migrasi PMI ilegal di Malaysia di pengaruhi oleh jaringan sosial PMI ilegal, terutama dalam hal ini jaringan sosial PMI ilegal konstruksi di Malaysia. PMI ilegal konstruksi di Kongsu tersebar di beberapa wilayah di Malaysia. Sebagian besar PMI tersebut tanpa dokumen yang lengkap dan bahkan *overstay*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian bahwa adanya migran PMI ilegal konstruksi di Malaysia karena adanya jaringan sosial yang mereka miliki. Jaringan sosial PMI ilegal konstruksi di Malaysia yang terjadi yaitu jaringan sosial kekuasaan jaringan ini hanya sebatas untuk mendapatkan keamanan dari pihak yang berkuasa di sekitar kongsu, yaitu oknum kepolisian Malaysia yang memiliki kekuasaan. Jaringan sosial kepentingan yaitu hubungan yang terjadi dalam jaringan antara PMI ilegal konstruksi dengan PMI ilegal konstruksi lainnya, hubungan PMI ilegal konstruksi dengan menkong, menkong dengan perusahaan, menkong dengan tokeh. Jaringan sosial perasaan dalam hubungan ini jaringan perasaan sangat dominan, terbentuk atas dasar hubungan sosial bermuatan perasaan yang terjalin di Kongsu dan hubungan sosial PMI ilegal itu sendiri menjadi tujuan dan tindakan sosial PMI ilegal konstruksi. Kemudian jaringan sosial keluarga yaitu hubungan yang terbentuk atas dasar jaringan keluarga yang dimiliki oleh PMI ilegal konstruksi. Kesimpulan Jaringan sosial sangat penting bagi PMI ilegal konstruksi di Malaysia, karena dengan jaringan tersebut PMI mendapatkan informasi yang dianggap cukup valid oleh para PMI ilegal konstruksi. Jaringan ini memberikan fasilitas kepada PMI ilegal untuk dapat bertahan hidup di Malaysia.

Kata Kunci: Pekerja Migran, Migran ilegal, Jaringan Sosial, Tindakan Sosial

ABSTRACT

The magnitude of illegal migrant worker migration in Malaysia is influenced by the social networks of illegal migrant workers, especially in this case the social networks of illegal construction workers in Malaysia. Illegal construction migrant workers in Kongsu are spread across several regions in Malaysia. Most of these PMIs are without complete documents and even overstay. This research uses a qualitative approach with descriptive data presentation with a case study method. The result of the research is that there are illegal construction migrant workers in Malaysia because of the social network they have. The social network of illegal construction PMIs in Malaysia that occurs is the social network of power, this network is only limited to obtaining security from those in power around the kongsu, namely Malaysian police officers who have power. The social network of interests is the relationship that occurs in the network between illegal construction workers and other illegal construction workers, the relationship between illegal construction workers and menkong, menkong and companies, and menkong and tokeh. The social network of feelings in this relationship is very dominant, formed on the basis of emotionally charged social relationships that exist in the Kongsu, and the social relationships of illegal PMIs themselves become the goals and social actions of illegal construction PMIs. Then the family social network is a relationship formed on the basis of the family network owned by illegal construction PMI. Conclusion Social networks are very important for illegal construction migrant workers in Malaysia, as they provide migrant workers with information that is considered quite valid by illegal construction migrant workers. This network provides facilities for illegal migrant workers to survive in Malaysia.

Keywords: Migrant Workers, Illegal Migrants, Social Networks, Social Action

² Universitas Padjadjaran, m.fadhil.nurdin@unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran, bintarsih.sekarningrum@unpad.ac.id

⁴ Kementerian Agama, agustinarini56@gmail.com

PENDAHULUAN

Proses migrasi yang pelik dan perjuangan para migran ilegal untuk sampai ke Malaysia tidak semuda membalikkan telapak tangan, harus melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Secara rasional proses yang panjang mengurangi keefektifan individu dalam melakukan sebuah tindakan dan kecenderungan tidak melakukan tindakan tersebut. Tetapi peneliti melihat fenomena PMI ilegal konstruksi bangunan, meskipun melalui proses yang panjang dan pelik tenaga kerja tetap melakukan migrasi yaitu melalui proses ilegal atau tidak resmi, padahal tindakan tersebut membahayakan dirinya sendiri. Seringnya dilakukan *sweeping* tenaga kerja asing di Malaysia tidak serta merta menjadi pertimbangan tenaga kerja untuk mengurungkan niat melakukan migrasi, hal ini dipandang penting oleh peneliti. Sebab pada dasarnya tindakan yang tidak ada penghargaan terhadapnya, kecenderungan untuk tidak melakukan bahkan mengulangi tindakan tersebut, maka disini peneliti melihat fenomena lain dari tindakan PMI ilegal. Individu yang bermigrasi adalah mahluk sosial yang kompleks, dan dengan tujuan harapan kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi, kompleksitas tersebut diantaranya adanya hubungan dengan keluarga atau pribadi, emosional dan keluarga yang menginginkan, menyatakan harapan dan peraturan, kondisi tempat kerja baru, kecenderungan budaya baru, politik identitas, dan kondisi-kondisi ekonomi dan politis. Ketika banyak orang melakukan migrasi, maka mobilitas dengan tujuan untuk pertumbuhan menciptakan kesejahteraan yang baru (Butt, 2014).

Pasar tenaga kerja di Malaysia cukup besar dengan 170.000 perusahaan yang tersedia (IOM, 2010). Pasar ketenagakerjaan di Malaysia di atur dalam akta, dimana akta tersebut statute-satatuta ketenagakerjaan di Malaysia (Pahroji & Singadimedja, 2012) yaitu; Akta pekerjaan 1955, dirubah 1989, Akta Kesatuan Sekerja 1959, dirubah 1989, Akta Perhubungan Perusahaan 1957, dirubah 1980, 1989, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta pekerjaan Anak-Anak dan Orang Muda 1966. Adapun data migrasi Internasional ke Malaysia menurut Kementrian Sumber Daya Manusia Malaysia terdapat 2.109.954 tenaga kerja di Malaysia yang bekerja di semua sektor ekonomi, sekitar 170.000 perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (IOM, 2010), sedangkan tenaga kerja Indonesia yang terdapat di berbagai sektor kerja sebesar 1.214.000 tenaga kerja. Untuk sektor konstruksi sebesar 220.000 tenaga kerja atau 18.1%.

Keterbatasan sumber daya didaerah asal menjadi perhatian aktor migran PMI ilegal konstruksi, sebab dalam pencapaian tujuan para PMI ilegal konstruksi, seorang aktor melihat tujuan tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi atau tidak dan aktor akan memutuskan untuk tidak mengejar tujuan tersebut dikarenakan sumber daya yang tersedia tidak memadai didaerah asal, dan aktor melihat peluangnya untuk mencapai tujuan yang berikutnya sangat bernilai, dalam hal ini aktor akan memaksimalkan keuntungan yang ingin dia dapat, dimana dalam pencapaian tujuan tersebut meliputi penilaian gabungan antara peluang untuk mencapai tujuan utama dan apa yang telah dicapai pada peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan kedua yang bernilai (Ritzer & Goodman, 2014).

Mobilitas penduduk Indonesia semakin berkembang seiring dengan globalisasi dan perkembangan arus

informasi dan transportasi ke luar negeri. Migrasi tenaga kerja internasional telah menarik perhatian kalangan internasional dalam dua dekade terakhir karena banyaknya Negara yang terkena dampak migrasi internasional dan ingin meningkatkan manfaat yang bisa didapatkan bagi para tenaga kerja sekaligus mengelola arus migrasi tenaga kerja dengan baik (IOM, 2010). Peningkatan transportasi dan arus informasi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya mobilisasi (Mei, 2006). Migrasi tenaga kerja dapat dilakukan baik secara resmi atau pun tidak resmi, difasilitasi atau tidak, tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap Negara pengirim maupun Negara tujuan (IOM, 2010). Menurut data BP2MI tahun 2023, Indonesia adalah termasuk Negara yang cukup banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Pada bulan Juni 2021, terdapat 6.661 penempatan pekerja migran Indonesia, peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan bulan Juni tahun sebelumnya. Jumlah penempatan melonjak secara signifikan pada bulan Juni 2022, mencapai 15.700 penempatan, menunjukkan kenaikan sebesar 135 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan penempatan tidak berhenti di sana; pada bulan Juni 2023, jumlah penempatan melonjak menjadi 20.388, menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan yang signifikan dari Juni 2021 ke Juni 2022 dan peningkatan yang signifikan pada Juni 2023 menunjukkan permintaan yang sangat tinggi untuk penempatan. Permintaan yang meningkat untuk tenaga kerja Indonesia di berbagai negara ditunjukkan oleh kenaikan yang signifikan dari Juni 2021 ke Juni 2022 dan peningkatan yang signifikan pada Juni 2023. Ini menunjukkan bahwa pengusaha asing semakin mengakui keterampilan dan kemampuan Pekerja Migran Indonesia dan memilih untuk mempekerjakannya. Jumlah penempatan yang meningkat menunjukkan bahwa karyawan Indonesia sangat dihargai dan diminati di pasar kerja internasional.

Tabel 1 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia per 1 Juli 2023

NO	NEGARA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1	Taiwan	5.889	5.829	7.816	5.795	7.695	6.154	39.178
2	Hongkong	4.834	5.938	5.701	4.485	7.385	5.296	33.639
3	Malaysia	9.510	8.500	6.629	3.346	5.659	4.834	38.478
4	Jepang	575	719	752	732	931	1.218	4.927
5	Korea Selatan	1.099	1.807	1.293	477	1.591	732	6.999
6	Arab Saudi	454	480	267	264	494	465	2.424
7	Turki	77	90	329	313	459	364	1.632
8	Singapura	554	559	628	201	314	316	2.572
9	Italia	270	298	28	201	425	313	1.535
10	Polandia	145	109	183	91	169	110	807
11	Brunai Darussalam	122	51	49	19	85	72	398
12	Maldivest	46	57	42	67	79	68	359
13	Papua New Guini	58	48	60	45	86	67	364
14	Uni Emirat Arab	74	38	26	25	48	44	255
15	Rusia	32	29	27	35	57	40	220
16	Solomon Islands	38	46	66	37	37	36	260
17	Bulgaria	2	3	3	22	89	32	151
18	Qatar	11	8	2	6	15	32	74
19	Selandia Baru	4	29	55	4	3	30	125
20	Slovakia	16	10	34	28	66	25	179
21	Kuwait	52	51	35	19	40	23	220
22	Rumania	5	7	10	4	34	22	82
23	Zambia	16	4	27	2	12	17	78
24	Cyprus	2	4	7	20	18	16	67
25	Bosnia Herzegovina	0	0	0	0	0	8	8
26	Lainnya	131	75	202	120	178	54	760
	Jumlah	24.016	24.789	24.271	16.358	25.969	20.388	135.791

Sumber: BP2MI, 2023

Dari data tersebut arus migrasi ke Malaysia berada di peringkat tiga terbesar. Migran di Malaysia didominasi oleh Negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara (IOM, 2010). Indonesia adalah salah satu

diantara Negara-negara tersebut yang setiap tahun mengirim tenaga kerja untuk di tempatkan di berbagai sektor di Malaysia, tentunya mempengaruhi pertumbuhan penduduk Malaysia. Malaysia memiliki daya tarik bagi para buruh migran Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja tidak terampil atau semi terampil (IOM, 2010). Tenaga kerja Indonesia sering disebut dengan tenaga kerja Indonesia atau disingkat PMI (Tenaga Kerja Indonesia (PMI) adalah sebutan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang dalam tulisan ini selanjutnya disingkat dengan PMI). Keberadaan PMI ini sangat dibutuhkan berbagai sektor ekonomi di Malaysia (Maksum, 2015). Namun tidak jarang juga menjadi permasalahan bagi Negara Malaysia.

Permasalahan tenaga kerja ilegal yang menjadi perhatian serius antara Malaysia dan Indonesia, dimana PMI di Malaysia diperlakukan seperti kriminal terutama oleh polisi setempat dan bahkan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, tetapi pemerintah tidak menyadari itu (Nurdin, Herdiansyah, & Gunawan, 2015). Bagi Malaysia sendiri tenaga kerja ilegal dari Indonesia menguntungkan perusahaan yang memperkerjakan buruh migran ilegal, tetapi secara administratif merugikan karena berdampak pada peningkatan jumlah penduduk Malaysia. Tenaga kerja resmi atau tidak resmi membantu memperbesar jumlah angkatan kerja di Negara tujuan dan dapat membantu pembangunan di Negara mereka sendiri melalui uang penghasilan mereka (IOM, 2010). Besarnya arus migrasi secara ilegal ke Malaysia menjadi tantangan tersendiri bagi Negara yang terkenal dengan Negeri Jiran tersebut. Migrasi tenaga kerja ilegal dari Indonesia ke Malaysia terbilang cukup banyak, Malaysia menjadi Negara tujuan migran paling besar bagi PMI ilegal, dengan melalui batas garis wilayah dan berbagai akses dilakukan untuk mencapai tujuan buruh migran, baik jalur darat, laut dan udara. Data resmi tahun 2006 dari Malaysia diperkirakan ada 700.000 tenaga kerja ilegal di Malaysia yang sebagian besar berasal dari Indonesia, akan tetapi sumber tidak resmi menyatakan bahwa jumlah PMI ilegal mungkin bisa dua kali lipat lebih banyak (IOM, 2010). Migrasi tenaga kerja ilegal dari Indonesia adalah fenomena yang menarik untuk dianalisa. Migrasi penduduk Indonesia ke Malaysia sudah terjadi semenjak ratusan tahun lalu tetapi meningkat drastis pada tahun 1960-an, 1970-an hingga tahun 2007. Terhitung semenjak tahun 1996 total 517.169 buruh migran dan tahun 2007 berjumlah 696.746 buruh migran (IOM, 2010). Namun setelah tahun 2007 terjadi penurunan secara drastis yaitu adanya peraturan-peraturan baru yang di buat oleh pemerintah Indonesia, yaitu pengurangan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Data triwulan 1 (satu) tahun 2016 menunjukkan jumlah penempatan migran tenaga kerja Indonesia berjumlah 59.372 buruh migran (BNP2TKI, 2016). PMI ilegal bukan merupakan satu pilihan bagi para migran, seperti studi yang dilakukan oleh *Institute for Ecosoc Rights* yang di kutip oleh IOM (2010) mengidentifikasi ada 4 (empat) faktor utama penyebab tenaga kerja migran resmi menjadi ilegal, yaitu; pertama dikarenakan rumitnya administrasi, tidak praktis, biaya yang cukup besar dan dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan migrasi melalui jalur resmi. Kedua, peraturan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia menempatkan tenaga kerja resmi kepada majikan yang sudah ditunjuk, sedangkan tenaga kerja ilegal bebas untuk memilih majikan. Ketiga, tenaga kerja resmi terkesan di eksploitatif sering terjadi kekerasan fisik, tekanan psikologis, gaji yang tidak dibayar. Keempat,

MoU antara Indonesia dan Malaysia memperbolehkan dokumen perjalanan tenaga kerja migran disimpan oleh majikan.

Kemudian berdasarkan kajian Mei (2006) tentang buruh migran Indonesia di Malaysia. Menurut Mei (2006) pekerja imigran didominasi oleh semi-terampil dan pekerja dengan pendidikan yang rendah. Ada faktor-faktor yang menyebabkan migrasi pekerja dari Indonesia ke Malaysia. Pertama, kesenjangan pasar tenaga kerja dan ekonomi. Kedua, peningkatan transportasi dan arus informasi, faktor ini menjadi penyebab utama besarnya arus migrasi dan pola migrasi pekerja dari Indonesia ke Malaysia. Ketiga, tambahan migran ilegal disebabkan oleh biaya administrasi yang tinggi migrasi (termasuk pembayaran tenaga kerja lembaga-lembaga di Indonesia dan Malaysia). Keempat, birokrasi prosedur dan kebijakan imigrasi yang ketat di Malaysia (Mei, 2006). Persoalan migrasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi faktor eksternal menjadi halangan tersendiri, seperti administrasi, agen dan aturan perundang-undangan di Negara asal dan Negara tujuan, sehingga terkadang memberatkan tenaga kerja Indonesia dan tidak jarang banyak kasus yang terjadi mulai dari perdagangan manusia hingga kekerasan (Butt, 2014). Penempatan PMI juga dalam permasalahan yang cukup serius dalam terciptanya eksploitasi PMI di Malaysia, seperti yang diungkapkan Primawati (2012) dalam kajiannya tentang penempatan PMI masih dengan paradigma komoditas. Berdasarkan hasil kajian proses dari awal calon PMI mendaftar sampai dengan pemberangkatan, bahkan kepulangan, proses di Indonesia sangatlah berliku. Proses yang dilalui oleh PMI sangatlah banyak dan terkesan aneh, dimana harus melalui para calo liar, calo legal di birokrasi, bahkan para calo mengambil keuntungan dari proses tersebut. Agen resmi adalah pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap setiap proses yang dilalui oleh PMI, sebab mereka adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab agar semua proses berjalan dengan lancar dan tidak harus melalui calo yang hanya mencari keuntungan. Berdasarkan hasil temuan mereka tidak memposisikan diri mereka sebagai pelayan yang baik agar proses menjadi mudah, tertib, yang ditemukan adalah bertindak penuh atau terlalu banyak aturan yang dibuat (Primawati, 2012).

Pihak pemerintah Indonesia sendiri ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya pengurusan tenaga kerja Indonesia (Helmi, 2013), yaitu; pertama, pemerintah Indonesia belum memiliki konsep filosofi dan program komprehensif. Kedua, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia belum maksimal, karena masih bersifat fungsional, sehingga cenderung terjadinya pungli. Ketiga, pelatihan dan pendidikan yang masih lemah, seharusnya pemerintah memberikan pelatihan dan memperhatikan pendidikan PMI, dapat dilakukan di Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat). Keempat, perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan kecurangan yang terjadi dalam proses pengiriman pekerja Indonesia seperti keperluan dokumen, penyalahgunaan dan pengiriman pekerja Indonesia tidak resmi (kosong). Kelima, belum optimalnya usaha perlindungan pemerintah atas hak-hak pekerja Indonesia selama bekerja di luar negeri (Helmi, 2013), sehingga kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam bentuk nota kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* (MoU) (Pahroji & Singadimedja, 2012).

Disamping sebagai solusi pembangunan, tenaga kerja ilegal migran dari Indonesia ke Malaysia

juga menyebabkan konflik dan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia, kedua Negara tidak berhasil kerjasama atas masalah pemulangan imigran ilegal Indonesia. Migrasi pekerja terampil dan semi terampil dari Indonesia masih dominan. Sehingga pemerintah Indonesia dan Malaysia memfasilitasi migrasi pekerja internasional, terutama untuk migran tenaga kerja tidak terampil dan semi-terampil seperti proses pemulangan. Kemudian perlunya kerjasama yang lebih besar antara kedua negara yang bertujuan untuk memastikan kelancaran arus penyediaan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, meminimalkan masalah migrasi ilegal dan efek politik, ekonomi dan sosial yang negatif, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi migran (Mei, 2006). Buruh migran ilegal Indonesia tersebar di berbagai sektor di Malaysia, terutama sektor konstruksi di Malaysia yang menjadi perhatian peneliti. Fisik bangunan di Kota Malaysia semakin menunjukkan perkembangan (Shuid, 2004). Disamping itu pembangunan juga didukung oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk dan produktifitas tenaga kerja. Perkembangan terjadi karena besarnya arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya ke Malaysia. Tingkat upah yang tinggi, geografis, bahasa, dan pasar kerja di Malaysia menjadi alasan tenaga kerja ilegal asal Indonesia semakin banyak melakukan migrasi ke Malaysia. Data menunjukkan demografi PMI di Malaysia berdasarkan sektor kerja sebagai berikut:

Tabel 2. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI)¹ ke Luar Negeri Menurut Negara Tujuan, Sektor, dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Number of Indonesian Workers by Destination, Sector, and Sex in Nusa Tenggara Timur Province, 2023

Negara Tujuan		Informal			Formal			Formal + Informal		
<i>Country Destination</i>		L/M	P/F	Total	L/M	P/F	Total	L/M	P/F	Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Malaysia	–	1.076	1.076	64	39	103	64	1.115	1.179
2	Singapura	–	61	61	–	1	1	–	62	62
3	Hongkong	–	26	26	–	–	–	–	26	26
4	Papua New Guenie	–	–	–	3	–	3	3	–	3
5	Jepang	–	–	–	6	8	14	6	8	14
6	United Emirate Arab	–	–	–	1	–	1	1	–	1
7	Solomon	–	–	–	2	–	2	2	–	2
8	Qatar	–	–	–	11	–	11	11	–	11
9	Brunei Darussalam	–	–	–	7	–	7	7	–	7
Jumlah		–	1.163	1.163	94	48	142	94	1.211	1.305
Total										

Catatan/Note: 1 PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah RI

¹ *Indonesian Workers is every Indonesian citizen who will, is or has done working and receiving wages outside the Republic of Indonesia*

Sumber: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur

Kuala Lumpur adalah Ibu Kota Negara Malaysia, Kota metropolitan yang mengalami perkembangan cukup pesat di Malaysia. Sebagai Kota metropolitan pasar kerja di Malaysia cukup banyak, dan pasar kerja tersebut menjadi salah satu alasan buruh migran konstruksi semakin banyak melakukan migrasi ke Malaysia baik secara resmi maupun tidak resmi, tercatat 270.000 perusahaan menerima rekrutmen tenaga kerja Indonesia (IOM, 2010). Besarnya permintaan tenaga kerja tersebut menjadi salah satu sumber daya yang dimanfaatkan oleh PMI konstruksi bangunan. Proses pengiriman tenaga kerja secara resmi didukung oleh hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia yang terjalin semenjak tahun 1957 hingga sekarang (Maksum, 2015). Namun untuk tenaga kerja ilegal Indonesia dan Malaysia belum melakukan kerjasama, melainkan pihak pemerintah Malaysia membuat berbagai macam kebijakan terutama gencar *sweeping* tenaga kerja ilegal, kemudian dilakukan pemulangan ke Indonesia. Sedangkan Negara Indonesia sendiri meminta untuk mempermudah pemulangan PMI ilegal. Seperti yang termuat di beberapa kabar Tribun Batam (2016) dan Sindonews (2016). Kapal pembawa puluhan PMI Ilegal dari Malaysia tenggelam di perairan Nongsa, hari rabu 01 November 2016, sekitar 93 korban. Kajian yang dilakukan Kartono (2014) tentang migrasi tenaga kerja mancanegara: sebuah kasus dengan pendekatan sosiologi ekonomi. Sudut pandang berbeda dalam melihat migrasi sebagai motif ekonomi, Butt (2014) menjelaskan tentang migrasi, mobilitas, dan transnasional, menunjukkan migrasi itu bukanlah suatu pilihan ekonomi yang hanya disebabkan oleh individual tetapi tindakan sosial yang lebih kompleks. Orang pindah atau para aktor membentuk sifat alami pada saat ini, dimana arus ekonomi dan budaya yang mempengaruhi. Butt (2014) menekankan suatu pandangan migrasi *holistic*.

Berdasarkan observasi peneliti peran jaringan sosial buruh migran menjadi salah satu faktor pendorong buruh migran melakukan migrasi ke Malaysia. Sebab dalam pandangan para teoritis jaringan, pendekatan-pendekatan normatif berfokus pada kebudayaan dan proses sosialisasi yang merupakan sarana untuk menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai kepada para aktor (Ritzer, 2012). Jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai, dimana jaringan memberikan dasar kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama dan tidak sekedar bersama dengan orang yang mereka kenal (Field, 2010). Meskipun hubungan diplomatik semakin menguatkan kerjasama antar kedua Negara, terutama bidang ketenagakerjaan, tetapi tidak semua permasalahan ketenagakerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Berkaitan dengan ketenagakerjaan, sebagian besar migran tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia memiliki keterampilan rendah yang umumnya menempati pekerjaan yang kotor dan berbahaya (IOM, 2010). Terutama untuk sektor konstruksi di Malaysia yang menjadi studi kasus penelitian. Pekerja konstruksiadalah faktor utama penentu penyelesaian proyek dan pertumbuhan bangunan di kota-kota besar (Rinil & Tenriajeng, 2014). Hasil kajian yang dilakukan oleh Denzil Fernandes dan Bino Paul GD (2011) tentang jaringan sosial pekerja konstruksi migran di Goa, bahwa jaring sosial bekerja di antara pekerjaan konstruksi migran menunjukkan pasar kerja yang mengalami fase perkembangan, baik arus informasi tentang pasar tenaga kerja, informasi angkatan kerja, alokasi pekerjaan di situs konstruksi, hubungan persahabatan di antaranya dan arus saling menguntungkan antar para pekerja migran untuk

memenuhi kebutuhan mereka. Setelah pekerja migran memutuskan pindah dari tempat asalnya dia dan memasuki pasar tenaga kerja dengan bantuan jaringan sosial tenaga kerja migran. Jaringan ini terdiri dari kontraktor, agen, mantan migran, teman, dan saudara.

Jaringan migran memfasilitasi arus tenaga kerja migran ke pasar tenaga kerja konstruksi buruh migran tidak hanya membutuhkan jaringan untuk masuk pasar tenaga kerja, tapi mereka juga membutuhkan jaringan dengan penduduk setempat atau agar mendapat dukungan sosial sistem di tempat tujuan, dengan jaringan yang mereka miliki mereka juga pertahankan teman dan keluarga di tempat asal mereka. Jaringan migran memberikan wawasan penting tentang sifat konstruksi yang sangat tidak terorganisir dalam pasar tenaga kerja. Buruh migran selalu masuk pasar tenaga kerja dengan bantuan jaringan sosial migran (Fernandes & G.D, July 2011).

Mengapa peneliti tertarik untuk meneliti PMI konstruksi bangunan, karena berdasarkan observasi peneliti, peneliti menemukan banyaknya tenaga kerja ilegal yang bekerja di sektor konstruksi bangunan. Karena sektor konstruksi tidak berada pada lokasi yang mudah diawasi oleh para petugas kepolisian Malaysia, sehingga PMI konstruksileluasa untuk dapat bekerja, dan berada pada daerah-daerah yang masih minim pengawasan kepolisian Malaysia, jikapun terjadi razia tenaga kerja dapat menghindari dengan bersembunyi di hutan-hutan terdekat. Disamping itu juga tenaga konstruksi merupakan sekelompok individu yang saling mengenal dan memiliki jaringan tersendiri. Mereka mendapatkan kerja dengan mencari informasi melalui jaringan yang mereka miliki, hal ini adalah proses menyambung (*bridging*) jaringan tersebut sebagai modal sosial yang dimiliki. Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas modal sosial yang menjebatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial (Field, 2010). Atau mengikat para anggota (*bonding*), menyambung (*bridging*), mengait (*linking*) PMI ilegal di Malaysia.

Meskipun PMI ilegal konstruksi dibutuhkan di Malaysia, namun ada kebijakan pemerintah Malaysia ingin memberdayakan tenaga kerja lokal dengan mengurangi ketergantungan tenaga kerja konstruksi dari Indonesia. Politik pemerintah Malaysia dalam membatasi kebergantungan pada pekerja konstruksi asing Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia mengandung beberapa makna (Helmi, 2013), yaitu: pertama, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia menekankan kepada kekuatan militer. Kedua, bertujuan untuk mengamankan warganegara Malaysia dari ancaman tenaga kerja tidak resmi (kosong), namun kebijakan tersebut mengancam *human security* yaitu pekerja tidak resmi (kosong) asal Indonesia. Ketiga, Undang-Undang yang telah di buat oleh pemerintah Malaysia terdapat kekurangan bahwa Undang-Undang tersebut mempengaruhi efektifitas pengendalian pekerja tidak resmi (kosong) yang berasal dari Indonesia. Keempat, penerapan kebijakan pemerintah Malaysia yang menolak tenaga kerja yang telah melengkapi dokumen persyaratan migrasi, sehingga tindakan tersebut kurang efektif dan efisien. Berdasarkan isu diatas perlu juga dilakukan penelitian terkait *human security* PMI ilegal asal Indonesia, hal ini penting untuk dilakukan penelitian lanjutan mengingaty keamanan PMI ilegal di negara tujuan sangat penting tentunya menyangkut hak-hak yang dimiliki oleh PMI sebagai manusia.

Dari uraian dan sudut pandang diatas, peneliti melihat migrasi PMI ilegal konstruksi terjadi hanya pada level makro dan tidak melihat proses migrasi terjadi ditingkat mikro. Sehingga sangat penting untuk melihat proses migrasi PMI ilegal dalam melakukan tindakan migrasi ke Malaysia untuk bekerja di sektor konstruksi khususnya di level mikro. Dimana tindakan tersebut dipengaruhi oleh modal sosial yang mereka punya. Dalam penelitian ini lebih menekankan kepada jaringan sosial yang dimiliki oleh migran yaitu jaringan yang dibangun atas dasar kepentingan, kekuasaan dan perasaan yang dimiliki. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kelompok PMI ilegal di Malaysia melakukan (*bonding*) PMI ilegal konstruksi bangunan, menyambung (*bridging*) PMI ilegal konstruksi dalam sebuah jaringan, dan mengait (*linking*) PMI ilegal dalam sebuah jaringan yang memiliki norma yang harus dipatuhi bersama. Proses-proses sosial yang berskala kecil atau fenomena-fenomena yang muncul pada level mikro menjadi titik pusat pencarian ilmiah dan dipandang penting sebagai tingkat dasar dalam analisis sosial (Mirsal, 2004). Disamping itu juga peneliti ingin menggali informasi yang lebih dalam mengenai jenis dan fungsi jaringan sosial tenaga kerja Indonesia yang bekerja di konstruksi di Malaysia. Peneliti melihat belum adanya penelitian mengenai jaringan sosial PMI ilegal di Malaysia, terutama PMI ilegal yang bekerja di sektor konstruksi dengan menggunakan pendekatan teori jaringan sosial dengan menekankan kepada jaringan dalam hasil. Mengingat migran konstruksi memiliki jaringan yang cukup besar di Malaysia terkhusus untuk tenaga kerja konstruksi bangunan yang berasal dari Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertanyaan peneliti untuk mengkaji jenis jaringan sosial PMI konstruksi yang dirasa memiliki sumber daya yang lebih di bidang konstruksi. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis jenis jaringan sosial PMI konstruksi di Malaysia, sehingga aspek manfaatnya bagi kehidupan masyarakat dan dapat diketahui secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menganalisa bagaimana jenis jaringan sosial tenaga kerja konstruksi di Malaysia dan fungsi jaringan sosial PMI ilegal konstruksi, sehingga dapat bertahan hidup di Malaysia, digambarkan secara deskriptif. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang digunakan untuk menganalisa jaringan sosial tenaga kerja Indonesia konstruksi di Malaysia. Tujuan dari format ini untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu kenyataan sosial. Dengan *qualitative* peneliti dapat menyajikan data-data atau informasi penting tentang pola jaringan sosial tenaga kerja konstruksi di Malaysia dan fungsi jaringan PMI ilegal konstruksi sehingga dapat bertahan hidup di Malaysia yang dapat disajikan dalam bentuk deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi dan dokumen sekunder. Penelitian ini dilakukan di Januari 2017 hingga Agustus 2017. Lokasi penelitian yaitu Kongsu Serdang, Kongsu CUIS, Kongsu Salak Tinggi, Kongsu Gombak, Kongsu Petaling, Kongsu PC, Kongsu Taman Muhibbah Puchong, Kongsu Puchong Colombia, dan Kongsu Lebuhraya. Penentuan informan ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan yang dipakai untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan dengan menganalisa bagaimana jenis jaringan sosial

tenaga kerja konstruksi di Malaysia dan fungsi jaringan sosial PMI ilegal konstruksi, sehingga dapat bertahan hidup di Malaysia. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu PMI ilegal konstruksi di Malaysia.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 30 informan. Alasan pemilihan 30 informan dikarenakan Lokasi PMI ilegal tersebar di 8 kongsi setiap Kongsi terbagi menjadi 2 atau 3 informan dengan 1 tahun *overstay* di negara tujuan. Data informan yang sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTT. Dimana usia rata-rata informan PMI ilegal konstruksi di Malaysia adalah 40 tahun, dengan umur minimum informan dalam penelitian ini adalah 21 tahun sedangkan umur tertua adalah 57 tahun. Kemudian lama rata-rata informan menetap dan bekerja di Malaysia yaitu 8 tahun sedangkan yang paling lama menetap yaitu 39 tahun sedangkan yang paling baru yaitu 1 tahun. Teknik validitas data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dengan mengumpulkan beberapa informasi dari sumber.

KERANGKA TEORI/KONSEP

1. Modal Sosial & Jaringan Sosial

Teori jaringan sosial akan menjadi sebuah teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa jaringan sosial tenaga Indonesia (TKI) kerja ilegal konstruksi di Malaysia. Adapun beberapa definisi jaringan sosial menurut para ahli ilmu sosial dimana telah terjadi metafora konsep, setiap konsep memiliki sumbangsih tersendiri bagi perkembangan teori modal sosial. Teori jaringan menjelaskan perhatian pada hubungan-hubungan sosial, atau pola objektif ikatan-ikatan yang menghubungkan para anggota (individu dan kolektif) masyarakat (Burt, 1992).

“Networks consist of more or less homogenous sets of ties among three or more positions. Social net works encompass ties linking nodes in a social system - ties that connect persons, groups, organizations, or clusters of ties, as well as people (Fernandes & G.D, July 2011).”

Jaringan (*network*) keanggotaan jaringan, dan seperangkat nilai bersama menjadi inti dari konsep modal sosial (Field, 2010). Infrastruktur dinamis dari wujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia (Putnam, 1993).” Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Putnam (1995) berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu. Relasi-relasi sosial yang terbentuk ketika individu-individu berupaya menggunakan sumber-sumber individual mereka sebaik-baiknya tidak hanya penting dilihat sebagai sumber-sumber untuk para individu tersebut (Coleman, 2009). Menurut Agusyanto (1997:26-39) tujuan hubungan yang terbangun diantara aktor sehingga membentuk jaringan-jaringan sosial dalam masyarakat menjadi tiga jenis jaringan sosial, yaitu: Jaringan kekuasaan (*power*) merupakan jaringan hubungan-hubungan sosial yang dibentuk oleh hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kekuasaan. Jaringan kepentingan (*intensiif*) merupakan jaringan hubungan-hubungan sosial yang dibentuk oleh hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kepentingan. Jaringan perasaan (*sentiment*),

merupakan jaringan yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial bermuatan perasaan, dan hubungan-hubungan sosial itu sendiri menjadi tujuan dan tindakan sosial. Secara rinci, fungsi jaringan sosial dibedakan menjadi tiga kategori (Irfan, 2007) yang dikutip oleh (Safitri & Wahyuni, 2013), yaitu fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi informasi. Relasi-relasi sosial yang terbentuk ketika individu-individu berupaya menggunakan sumber-sumber individual mereka sebaik-baiknya tidak hanya penting dilihat sebagai sumber-sumber untuk para individu tersebut (Coleman, 2009). Melainkan sumber-sumber yang dimanfaatkan secara kolektifitas oleh aktor. Jaringan sosial juga merupakan bentuk dari modal sosial, modal sosial adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), kesaling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif (Cohen & L, 2001). Jaringan sosial pekerjaan meliputi hubungan yang menghubungkan dalam sistem sosial yang menghubungkan orang, kelompok, organisasi, atau kelompok ikatan, dan juga individu. Jenis jaringan terdiri dari jaringan sosial, ekonomi, politik interaksi, serta kolektif seperti kelompok-kelompok kekerabatan atau kelompok masyarakat dan pihak swasta (Fernandes & G.D, July 2011). Sebagaimana yang disampaikan oleh Coleman dalam melakukan tindakannya individu memiliki maksud dan tujuan dan tujuan tersendiri secara sengaja dilakukan (Ritzer, Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern), 2012).

2. Migrasi

Kamus Sosiologi, migrasi (*migration*) merupakan konsekuensi sebagai faktor pendorong (*negative*) dan faktor penarik (*positive*), yang tindakan tersebut dilakukan sukarela dan rasional (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010). Migrasi sebagai suatu bentuk perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal (IOM, 2010). Lee (1966) mendefinisikan sebagai berikut: *migration is defined broadly as a permanent or semipermanent change of residence*. Dari beberapa pengertian tersebut migrasi dapat disimpulkan bahwa migrasi sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap yang dipengaruhi oleh faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan.

Migrasi menurut Everett S. Lee (1966) ada empat faktor yang perlu di perhatikan dalam melakukan dalam studi migrasi penduduk yaitu:

1. Faktor-faktor daerah asal.
2. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan.
3. Rintangan antara (penghambat)
4. Faktor-faktor individual

Pendekatan Sosiologi dalam migrasi telah dilakukan oleh ilmuwan Sosiologi seperti yang diungkapkan dalam kamus Sosiologi Soerjono Soekanto mengatakan bahwa migrasi (*migration*) yaitu; 1) perpindahan

atau gerak penduduk secara permanen yang melewati perbatasan negara, 2) perpindahan atau gerak penduduk secara permanen yang menempuh jarak tertentu (Soekanto, 1983). Ekonomi Marxis melihat migrasi sebagai mobilisasi migrasi tenaga kerja yang murah yang dapat dimanfaatkan oleh kapitalisme (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010). Dalam paradigma perilaku sosial, *behavior sociology* adalah hubungan historis antara akibat tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku yang terjadi sekarang (Ritzer, 2009) sama halnya dengan tingkah laku migrasi individu yang berada pada level mikro yang akan berdampak pada level makro di kemudian hari. Telah diketahui bahwa didalam fenomena di tingkat makro, maka terdiri dari tiga hubungan jenis, yaitu makro-ke-mikro, tindakan purposif individu, dan peralihan mikro-ke-makro (Coleman, 2009). Kajian dalam penelitian ini lebih kepada hubungan peralihan mikro-ke-makro. Bagaimana tindakan individu yang kemudian mempengaruhi fenomena di tingkat makro. Bekerja di luar negeri merupakan salah satu pilihan bagi para TKI agar dapat tetap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia (ILO, 2007). *Work is the carrying out of tasks which enable people to make a living within the environment in which they find themselves* (Watson, 2003). Analisis Marx bahwa kebebasan pekerja untuk memilih majikan menjadi kebebasan yang sepenuhnya formal seiring dengan pertumbuhan kapitalisme, Marx berfokus kepada hubungan sosial yang terlibat dalam produksi barang dan jasa, sehingga mengabaikan isu efisiensi yang disepakati para ekonom, sebagai isu yang penting dalam hubungan ketenagakerjaan (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Jaringan Sosial

Berdasarkan teori bahwa jenis jaringan sosial ada tiga yaitu; jaringan kekuasaan, jaringan kepentingan dan jaringan perasaan. Namun berdasarkan temuan di lapangan peneliti menemukan jenis jaringan sosial baru, yaitu jaringan keluarga. Jaringan keluarga ini sangat berperan dalam migrasi tenaga kerja Indonesia ilegal konstruksi di Malaysia. Jaringan keluarga ini memberikan fungsi sosial terhadap PMI ilegal konstruksi di Kongsu. Sehingga dengan adanya dukungan sistem jaringan sosial baru ini, calon PMI ilegal konstruksi memberanikan diri untuk tinggal dan bekerja di Malaysia secara ilegal dapat digambarkan dalam skema sistem jaringan sosial baru yang dimaksud. Migrasi PMI ilegal konstruksi adalah migrasi ketenagakerjaan yaitu setiap aktor yang melakukan migrasi karena kepentingan akan pekerjaan di Malaysia. Untuk mencapai tujuan aktor, maka PMI ilegal konstruksi melakukan relasi dengan PMI ilegal konstruksi lainnya. Adapun beberapa temuan menurut relasi yang dibangun oleh PMI ilegal konstruksi untuk dapat bertahan hidup di Malaysia dapat dilihat pada uraian.

a. Jaringan Kekuasaan (*power*) PMI Ilegal Konstruksi

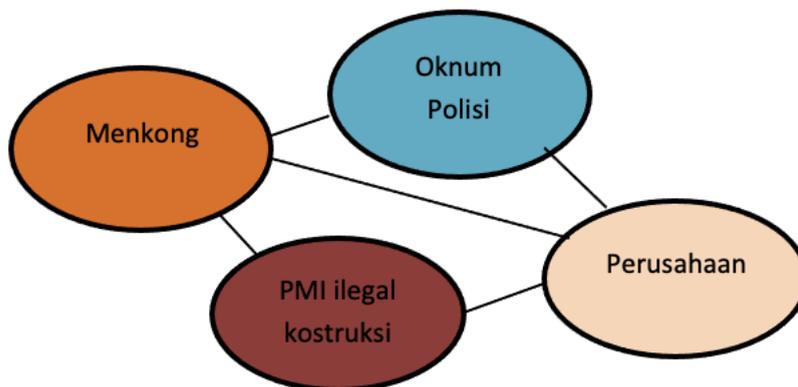
PMI ilegal konstruksi yang berada jaringan ini hanya sebatas untuk mendapatkan keamanan dari pihak yang berkuasa di sekitar Kongsu, yaitu pihak kepolisian Malaysia yang memiliki kekuasaan. Adapaun hubungan yang terjalin dalam jaringan kekuasaan ini adalah hubungan PMI ilegal konstruksi dengan

Menkong, hubungan menkong dengan oknum Polisi, hubungan menkong dengan perusahaan. Pihak yang berkuasa di dalam jaringan kekuasaan, saling keterkaitan antar pelaku, jaringan kekuasaan PMI ilegal disengaja atau diatur oleh pihak yang berkuasa yaitu oknum kepolisian Malaysia, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwajib di Malaysia. Jaringan PMI ilegal konstruksi ini terjadi di Kongsy-Kongsy yang ada di Malaysia. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak MSR dan MAF (18/09/2017), “Kami melakukan hubungan dengan PMI ilegal lainnya dan juga dengan menkong. Hubungan ini sangat membantu kami untuk dapat bekerja dan tinggal disini, karena tanpa mereka kita tidak bisa berbuat apa-apa”. Hubungan sosial PMI ilegal konstruksi ini dibentuk oleh hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kekuasaan yang akan menguntungkan aktor kooperat. Jaringan kekuasaan yang terjadi di Kongsy terjalin hubungan antara perusahaan, tekong, pekerja dan pihak yang berkuasa yaitu oknum kepolisian. Jaringan kekuasaan ini disepakati oleh setiap aktor. Namun aktor oknum polisi yang memiliki kuasa yang paling dominan atas kesepakatan atau tujuan masing-masing aktor yang dimiliki. Bapak MHMD (22/09/2017) “dekat sini juga ada pembangunan yang baru, kalau ada polisi yang kenal dikasih uang kopi, uang minum dan dilepas, tetapi jika ada operasi tidak bisa dihalangi, tetapi jika polisi sudah kenal”. Jaringan kekuasaan terjadi di setiap Kongsy pekerja konstruksi dengan tujuan untuk melancarkan proses pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan. Dari jaringan itu aktor memiliki tujuan, yaitu:

- 1) PMI ilegal konstruksi sendiri menginginkan jaminan keamanan dari pihak polisi Malaysia, berupa informasi jika terjadi razia besar-besaran oleh pihak imigrasi Malaysia, dengan begitu PMI ilegal konstruksi mempersiapkan diri untuk bersembunyi di hutan atau tempat persembunyian yang telah disediakan oleh perusahaan.
- 2) Menkong menginginkan pekerjaan akan terus berjalan tanpa ada yang mengganggu, dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Jika tidak menkong akan sulit dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan perusahaan.
- 3) Oknum polisi bertujuan untuk mendapatkan uang dari jaringan yang dibangun, meskipun keberadaanya sangat penting di Kongsy, tetapi dapat merugikan PMI ilegal konstruksi.
- 4) Perusahaan menginginkan agar pekerjaan berjalan lancar dengan waktu yang tidak lama.

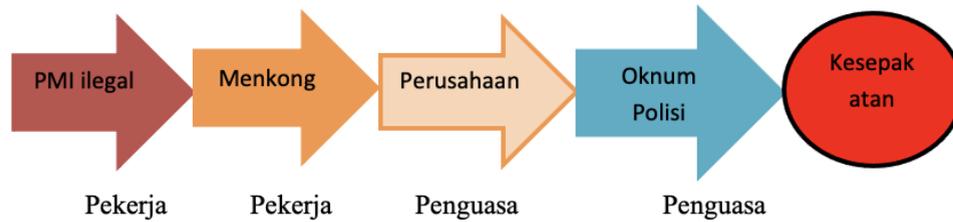
Untuk mewujudkan setiap keinginan dari para aktor maka ada kesepakatan dari semua aktor yang terlibat. Jika tidak terjadi kesepakatan maka resiko yang akan ditanggung oleh menkong, perusahaan dan para PMI ilegal konstruksi. Resiko inilah yang akhirnya menjadi beban bagi para PMI ilegal konstruksi, yaitu dengan membayar sejumlah uang kepada oknum polisi. Adapun jika tidak terjadi kesepakatan maka oknum polisi sering mengunjungi Kongsy untuk melakukan razia PMI ilegal konstruksi, sehingga jika tertangkap oleh pihak polisi PMI ilegal konstruksi mendapatkan kurungan 3-6 bulan dipenjara dan kemudian dideportasi atau dipulangkan ke Indonesia. Dengan begitu PMI ilegal konstruksi akan dipulangkan secara paksa dan untuk masuk ke Malaysia akan susah. Namun dengan jaringan yang ada PMI ilegal konstruksi akan tetap dengan mudah masuk ke Malaysia tidak harus bersusah payah. Sebab pihak imigrasi pun ada oknum-

oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan para PMI ilegal konstruksi. Dengan kesempatan yang ada akan membuat PMI ilegal konstruksi dapat dengan mudah masuk lagi ke Malaysia. Adapun skema jaringan yang terjadi adalah sebagai berikut:



Skema 1: Jaringan Kekuasaan di Kongsis (temuan dimodifikasi peneliti, 2017).

Jaringan kekuasaan di atas adalah hubungan yang terjalin senagat kuat (*power*), setiap aktor memiliki kekuatan masing-masing dalam hubungan. Jaringan ini terbentuk atas dasar ekonomi, oknum polisi setempat meminta sumbangan untuk keamanan para PMI ilegal konstruksi yang bekerja di Kongsis. Bapak LKN dan PMD (04/09/2017) “kita membayar uang 50 ringgi untuk keamanan kita di Kongsis. Saya ikhlas aja karena untuk keamanan”. Hal tersebut adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Meskipun tindakan tersebut melanggar hukum tetapi tindakan tersebut berlaku di beberapa Kongsis. Sebagai pendatang PMI ilegal konstruksi juga tidak bisa berbuat apa-apa di Kongsis, untuk menjamin keamanan mereka tetap melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk keamanan. Jaringan sosial kekuasaan ini bertujuan untuk pencapaian tujuan oleh pihak penguasa dibidang ekonomi dan semua aktor merasa diuntungkan. Jaringan sosial PMI ilegal konstruksi ini adalah sebuah tindakan yang kolektif dan saling keterhubungan antar pelaku dalam satu Kongsis. Uang, kelancaran pekerjaan, keamanan PMI ilegal konstruksi menjadi jaminan dari setiap pelaku dengan tujuan agar sistem kerja terus berjalan. Namun hal ini sangat merugikan para PMI ilegal, yaitu adanya pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Berikut alur jaringan kekuasaan di Kongsis kesepakatan yang terjadi di Kongsis, hubungan yang terjalin adalah hubungan yang berantai (*chain*), adapun hubungan dapat dilihat pada skema 2, yaitu:



**Skema 2: Alur Kesepakatan Jaringan Kekuasaan
(temuan dan dimodifikasi oleh peneliti, 2017)**

Penciptaan kondisi keamanan yang menjadi tujuan sehingga terbentuklah jaringan ini di setiap Kongs. Hubungan kekuasaan yang terjadi di Kongs ditujukan untuk penciptaan kondisi keamanan dan kelancaran dalam bekerja di konstruksi dengan begitu tidak ada hambatan berarti bagi perusahaan untuk menyelesaikan pembangunan. Bapak AMD (10/09/2017) “kita membayar uang untuk keamanan kepada oknum polisi dengan begitu kita akan akan”. Hubungan kekuasaan ini ditujukan pada penciptaan kondisi-kondisi yang dibutuhkan oleh para aktor, untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan unit-unit sosialnya artifisial yang direncanakan atau distrukturkan secara sengaja oleh kekuasaan. Sebenarnya jaringan ini tidak diinginkan oleh para PMI ilegal konstruksi, tetapi karena keadaan mereka tetap melakukannya. Namun dalam jaringan kekuasaan ini tidak mempunyai pusat kekuasaan yang secara terus menerus mengkaji ulang kinerja (*performence*) unit-unit sosialnya, dan mempolakan kembali strukturnya untuk kepentingan efisiensi, dalam hal ini kontrol formal tidak memadai, masalahnya jaringan ini lebih kompleks dibanding dengan jaringan sosial lainnya yang terbentuk secara alamiah. Dengan demikian jaringan sosial tipe ini tidak dapat menyandarkan diri pada kesadaran para anggotanya untuk memenuhi kewajiban anggotanya secara sukarela, tanpa intensif (Fernandes & G.D, July 2011).

b. Jaringan Kepentingan (*intensif*) PMI Ilegal Konstruksi

Hubungan yang terjadi dalam jaringan kepentingan ini terjadi antara PMI ilegal konstruksi dengan PMI ilegal konstruksi lainnya, hubungan PMI ilegal konstruksi dengan menkong, menkong dengan perusahaan, menkong dengan tokeh. Jaringan sosial PMI ilegal konstruksi terbentuk atas dasar kepentingan, yaitu adanya hubungan sosial yang terjalin diantara PMI ilegal konstruksi. Jaringan kepentingan ini dibentuk oleh hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kepentingan pribadi aktor PMI ilegal konstruksi. Jaringan kepentingan PMI ilegal konstruksi dibentuk oleh hubungan yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu terutama tujuan ekonomi dan pekerjaan di Kongs. Tujuan PMI ilegal konstruksi untuk memperoleh pekerjaan di konstruksi, sebab bekerja di konstruksi walaupun dalam keadaan kosong atau tanpa dokumen PMI ilegal konstruksi tetap mendapatkan upah, dapat tinggal dan bekerja di Malaysia. Walaupun terkadang upah yang diberikan dirafel 3 bulan sekali. Hal yang menarik dari jaringan ini, PMI ilegal konstruksi sebagai aktor memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia disetiap Kongs di Malaysia.

PMI ilegal konstruksi tujuan yang sudah dicapai oleh PMI ilegal yaitu besarnya upah, tempat tinggal dan pekerjaan. Namun ada tujuan lain yang diinginkan oleh PMI ilegal konstruksi yaitu upah yang lebih besar dan tingkat keamanan yang cukup terjamin. Bapak PMD (04/09/2017) “semua harus butuh kawan untuk mendapatkan peluang. Untuk melakukan kepercayaan kepada anggota cukup sulit”. Dengan upah yang besar dan keamanan yang terjamin akan membuat tujuan PMI ilegal konstruksi dapat dengan cepat tercapai. Hubungan dalam jaringan kepentingan dan kekuasaan PMI ilegal konstruksi di Kongsida tidak berlangsung lama atau berkelanjutan setelah berada di daerah masing-masing, berbeda dengan jaringan perasaan dan jaringan keluarga. Jaringan perasaan dan jaringan keluarga akan tetap terjalin karena ada rasa perhatian dan rasa sayang kepada PMI ilegal konstruksi. Karena struktur yang muncul dari jaringan sosial PMI ilegal konstruksi adalah sebentar dan berubah-ubah, sesuai dengan keinginan dan tujuan yang diinginkan oleh PMI ilegal konstruksi sudah terpenuhi atau belum. Maka jaringan kepentingan ini bersifat *conditional*.

Tujuan jaringan kepentingan PMI ilegal konstruksi ini tidak sekongkret dan spesifik seperti tujuan-tujuan yang berulang, maka struktur yang dibentuk relatif stabil dan permanen. Namun hubungan kepentingan ini sangat kecil terjadi di jaringan sosial PMI ilegal, karena PMI ilegal berada di negara orang selain kepentingan ekonomi, keamanan, tempat tinggal dan pekerjaan tidak mau menjadikan jaringan hanya sementara. Karena pada dasarnya jaringan kepentingan untuk mencapai tujuannya maka akan melakukan manipulasi. Jaringan kepentingan diatur oleh kepentingan-kepentingan para pelaku yang terlibat didalamnya dan untuk mencapai tujuannya para pelaku bisa memanipulasi hubungan-hubungan kekuasaan atau hubungan-hubungan perasaan (Agusyanto, 1997). Tetapi akan tetap berlanjut setelah berada di Indonesia, karena sebagian besar PMI ilegal konstruksi berasal dari satu daerah asal yang sama bahkan satu desa. Sehingga tidak jarang terjadinya persahabatan dan angkatan keluarga di Kongsida. Hubungan persahabatan selalu melibatkan hubungan keluarga atau hubungan antara pekerja yang datang dari desa atau Negara yang sama (Fernandes & G.D, July 2011). Jika terjadi kepentingan PMI ilegal konstruksi yaitu untuk perlindungan ketika berada di Malaysia.

c. Jaringan Perasaan (*sentiment*) PMI Ilegal Konstruksi

Hubungan yang terjalin dalam jaringan sosial ini yaitu hubungan PMI ilegal dengan PMI ilegal lainnya, hubungan PMI ilegal dengan menkong. Dalam hubungan ini jaringan perasaan sangat dominan. Jaringan sosial PMI ilegal konstruksi ini terbentuk atas dasar hubungan sosial bermuatan perasaan yang terjalin di Kongsida dan hubungan sosial PMI ilegal itu sendiri menjadi tujuan dan tindakan sosial PMI ilegal konstruksi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak JTM “nilai-nilai kemanusiaan sangat di junjung dalam jaringan ini”. Jaringan perasaan ini terjadi antara satu Kongsida dengan Kongsida lain, jaringan ini biasa dimanfaatkan setelah pembangunan telah selesai dibangun. Dengan selesainya dibangun maka PMI ilegal konstruksi menghubungi teman-teman di Kongsida lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Mizruchi (1990) dalam (Ritzer & Goodman, 2004) bahwa kesetaraan struktural besar perannya bagi

pemersatu dalam menerangkan kesamaan perilaku. Struktur yang dibentuk oleh PMI ilegal konstruksi adalah hubungan sosial yang terbentuk atas penilaian PMI ilegal konstruksi terhadap PMI ilegal konstruksi yang sedang mencari pekerjaan. Penilaian tersebut dapat berupa menyukai atau tidak menyukai aktor lain dalam jaringan PMI ilegal konstruksi. Dalam jaringan perasaan PMI ilegal konstruksi adanya saling kontrol secara emosional yang relatif kuat antar PMI ilegal konstruksi. Salah satu contoh setiap Kongsis saling memberi tahu tentang rencana razia besar-besaran yang akan dilakukan oleh polisi dan pihak imigrasi Malaysia. Ibu TRA (22/042017) “di Kongsis pas lagi ngobrol-ngobrol, makanya dek disini mesti sering-sering kumpul cerita-cerita kalau tidak seperti itu akan ketinggalan informasi tentang keamanan upah, kadang teman juga kasih tahu”. Dengan begitu PMI ilegal konstruksi bersiap-siap untuk bersembunyi di hutan yang terdekat dengan Kongsis. Persembunyian dapat 1-3 hari lamanya berada di hutan. Hal ini diakui oleh semua informan. Seperti yang dialami Ibu SH, karena Kongsis yang dia tempati belum dilakukan pemeriksaan dokumen, maka untuk beberapa hari harus ngungsi ke hutan. Namun jika waktu bekerja akan kembali lagi ke Kongsis untuk bekerja.

Namun ada juga jaringan sosial lainnya yang tidak berada dalam Kongsis, melainkan organisasi yang terstruktur. Organisasi yang dibuat atas dasar kemanusiaan, yaitu jaringan perasaan PMI ilegal konstruksi dengan organisasi IKMA yang memiliki perasaan kasihan kepada semua PMI ilegal yang berada di Malaysia. IKMA adalah organisasi yang terstruktur yang anggotanya sebagian besar adalah PMI legal. Mengapa PMI ilegal sedikit yang bergabung karena lokasi dan proses pendaftaran harus ke lokasi sekret IKMA, yang ada di pusat kota, maka PMI ilegal ada perasaan takut, karena tanpa dokumen. Sering kali ada kasus PMI ilegal ditipu oleh menkong, majikan dan agen, maka terbentuklah IKMA ini. Bapak MSR, MAF dan SLT (18/09/2017) “yang terpenting informasi tentang pekerjaan, tentang buat permit murah, dan tentang keamanan, karena sulit kalau tidak melakukan komunikasi dengan teman-teman”. Namun yang menjadi kendala IKMA adalah untuk menjangkau PMI ilegal sulit terutama PMI ilegal konstruksi. Maka jika terjadi PMI yang bermasalah maka IKMA akan membantu PMI tersebut, namun PMI tersebut terlebih dahulu menghubungi IKMA. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak JTM bahwa tujuan dibentuknya jaringan ini untuk membantu PMI ilegal dan legal yang bermasalah. Baik bermasalah mengenai dokumen dan kepulangan PMI ke Indonesia. Jaringan perasaan terjadi diantara PMI ilegal dan IKMA, karena perasaan kasihan IKMA terhadap PMI ilegal yang bermasalah. IKMA memberikan bantuan kepada semua PMI yang ada di Malaysia, tidak terkecuali.

Jaringan perasaan terjadi karena merasa kasihan sesama PMI ilegal konstruksi yang berada diperantauan, senasib, sebab tidak ada orang yang akan membantu selain sesama PMI ilegal konstruksi yang berasal dari Indonesia seperti jaringan antara Bapak MKR dengan Bapak WNO, yaitu mendapatkan bantuan dari Bapak MKR, Bapak MKR merasa kasihan dengan Bapak WNO. Bapak WNO memiliki hutang yang harus di lunasi di Indonesia sebesar Rp.10.000.000 untuk ongkos keberangkatan ke Malaysia. Kemudian Bapak MKR meminjamkan uang kepada Bapak WNO untuk melunasi hutang tersebut dan dibayar dengan cicil setelah bekerja di konstruksi. Kehidupan Bapak WNO tidak seindah yang bayangkan ketika

berada di Indonesia, setelah berada di Malaysia di Kongsu Ibu Bapak WNO merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan. Datang kesini ke Malaysia tidak untuk senang-senang melainkan mencari uang, tetapi hati Bapak WNO tidak tenang khawatir menjadi PMI ilegal tanpa dokumen. Kekhawatiran tidak hanya dirasakan oleh Bapak WNO, tetapi oleh semua PMI ilegal konstruksi di Kongsu. Ketakutan ketika akan di razia oleh pihak yang berkuasa di Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia. Apa yang dialami Bapak WNO dan PMI ilegal konstruksi lainnya sangatlah menyedihkan. Kasus yang dialami oleh Bapak WNO sangat menyedihkan, Bapak WNO dan istrinya tidak dapat menghadiri pernikahan anak perempuan pertamanya yang akan dilangsungkan di Lumajang. Hal ini disebabkan lamanya pengurusan berkas kepulangan, besarnya ongkos yang harus dibayarkan dan belum memiliki tabungan sedangkan hutang masih ada. Bapak WNO dan istrinya berlinang air mata atas nasib yang mereka alami. Mereka sangat berterima kasih kepada Bapak MKR karena telah membantu dalam pemberangkatan terutama pendanaan. Pengalaman yang dialami oleh Bapak WNO adalah jaringan sosial yang dibentuk oleh Bapak MKR sebagai menkong orang yang memiliki borongan, dibentuk atas dasar perasaan kasihan kepada Bapak WNO. Jaringan perasaan ini akan tetap berjalan meski PMI ilegal konstruksi berada di daerah masing-masing daerah. Tidak mudah bagi para PMI ilegal konstruksi untuk melupakan bantuan orang yang telah membantu selama berada di Kongsu. Sehingga jaringan tersebut menjadi jaringan persahabatan dan jaringan keluarga. Jaringan persahabatan dan kekeluargaan ini diantara pekerja konstruksi migran ini sangat membantu dalam mendapatkan informasi mengenai pekerjaan dan keamanan sesama PMI ilegal yang berada di Kongsu. Jaringan perasaan ini terjadi di setiap Kongsu seperti juga yang dialami oleh Ibu TRA, dia menetap di rumah PMI ilegal yang berjualan di Kongsu. Beliau tinggal disana sudah hampir satu bulan dan bekerja di Konstruksi, sebelumnya dia bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur tetapi karena merasakan tidak nyaman sama majikannya, ketika bekerja sebagai pembantu rumah tangga Ibu TRA meminta untuk tidak bekerja lagi dengan majikan, karena pekerjaan Ibu TRA dirasa sangat berat semua pekerjaan harus dilakukan dan tidur larut malam. Akhirnya bekerja di Kongsu sebagai Kongsikong di konstruksi.

Pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan PMI ilegal menjadikan PMI ilegal dapat bertahan hidup di Malaysia dan mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, disamping jaringan sosial yang mereka miliki dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Adapun jaringan sosial PMI yang terstruktur yaitu ikatan keluarga Madura (IKMA), namun jaringan ini hanya bergerak sebagai organisasi yang berafiliasi kepada kemanusiaan tidak dalam penyediaan sebagai ekonomi, sosial dan informasi mengenai pekerjaan. IKMA melihat banyak permasalahan PMI di Malaysia seperti penipuan, gaji yang tidak dibayarkan, *Human Trafficking* (perdagangan manusia), PMI yang mengalami musibah seperti kecelakaan, kematian dan lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak JTM (26/09/2017) “nilai-nilai kemanusiaan sangat di junjung dalam jaringan ini dan Nilai yang sangat dijunjung tinggi komitmen pengurus untuk perkembangan IKMA dalam setiap kegiatan sosialisasi sering dilakukan”. IKMA sudah terbentuk pada tanggal 5 September 2012 yang beralamat di NO. 3/3rd Jalan Pantai Murni 2 Pantai Dalam

59200 wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Organisasi ini berstatus badan hukum yang organisasi ini mewedahi aspirasi dan keperluan pekerja dan pelajar warga Madura yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yang dilandasi dengan jiwa setia, progresif, ramah dan berjiwa seimbang yang tersusun dalam ADART.

IKMA adalah organisasi yang tidak mengikat semua PMI kedalam organisasi ini, melainkan memberikan kebebasan kepada PMI asal Madura untuk bergabung atau tidak kepada organisasi ini. Tetapi IKMA memfasilitasi PMI yang bermasalah baik PMI secara legal maupun PMI ilegal dengan melakukan komunikasi ke KBRI, baik mengenai PMI yang bermasalah maupun mengenai kepulangan PMI ilegal untuk dipermudah. Pihak KBRI tidak berperan banyak dalam penanganan PMI tetapi pihak KBRI hanya bisa melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah. Pihak KBRI sendiri tidak bisa mendeteksi PMI ilegal di Malaysia, tetapi hanya bisa mendeteksi ketika PMI ilegal tersebut bermasalah. Ketika ada PMI yang bermasalah PMI ilegal maka KBRI melakukan pendekatan ke pihak pemerintah Malaysia untuk meminta mempermudah pemulangan PMI ilegal. PMI ilegal konstruksi yang bermasalah dalam proses penyelesaian masalah cukup panjang. Biasanya permasalahan yang terjadi dilapangan adalah adanya kecelakaan kerja dan mesti dilakukan penanganan untuk dapat memberikan perawatan kesehatan, namun karena dalam keadaan kosong maka penanganan tidak dapat dilakukan, sehingga perlu dilakukan tindakan pemulangan PMI ilegal. Untuk proses pemulangan PMI ilegal cukup panjang. Proses tersebut melibatkan tekong, menkong dan organisasi IKMA dan KBRI. Penyelesaian masalah yang membutuhkan proses yang panjang, sehingga harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yaitu pihak pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia. Jika tidak ada hubungan antara kedua pihak maka proses pemulangan PMI ilegal tidak dapat dilakukan secara resmi atau melalui jalur yang resmi, walaupun bisa maka dibutuhkan biaya kepulangan yang cukup besar. Maka untuk kepulangan PMI ilegal konstruksi dibutuhkan jalur ilegal. Jika kondisi darurat atau dalam keadaan sakit, terkadang PMI ilegal meminta bantuan organisasi yang resmi dan diakui oleh KBRI yaitu Ikatan Keluarga Madura (IKMA). Namun jika melalui jalur ilegal maka ada diskusi antara perusahaan, menkong dan PMI ilegal untuk kepulangan ke Indonesia. Diskusi yang dilakukan adalah mengenai biaya yang dikeluarkan dan jalur yang digunakan.

d. Jaringan Kekeluargaan (*family*) PMI ilegal konstruksi

Hubungan yang terjalin dalam jaringan kekeluargaan adalah PMI ilegal konstruksi dengan PMI ilegal konstruksi lainnya, hubungan PMI ilegal konstruksi dengan menkong. Hubungan yang terbentuk atas dasar jaringan keluarga yang dimiliki oleh PMI ilegal konstruksi. Jaringan keluarga sangat penting bagi PMI ilegal konstruksi di Malaysia, karena keluarga sebagai orang yang memberikan informasi yang dianggap cukup valid oleh para PMI ilegal konstruksi. Menurut Horton dan Hurl yang dikutip oleh (Suhendi & Wahyu, 2000) mendefinisikan keluarga sebagai suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama; suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak; para anggota suatu

komunitas yang biasanya mereka ingin disebut sebagai keluarga. Bagi para PMI ilegal keluarga sebagai fungsi protektif yaitu perlindungan atau kenyamanan bagi para PMI ilegal di Malaysia. Dalam setiap masyarakat keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis dan psikologi (Suhendi & Wahyu, 2000). Pola jaringan PMI ilegal konstruksi di Malaysia tidak terlalu terorganisir karena berada pada level mikro. Temuan peneliti mengenai adanya jaringan keluarga di Kongsu Malaysia, telah menunjukkan bahwa peran jaringan keluarga sangat besar terhadap keberadaan PMI ilegal konstruksi di Kongsu. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang sudah sukses bekerja di konstruksi di Malaysia dan memberikan stimulus kepada keluarga yang ada di Indonesia. Seperti yang diungkapkan Bapak PMD dan LKN (04/09/2017):

“dalam melakukan migrasi ke Malaysia Bapak melalui saudara saya di Malaysia. Semua yang melakukan migrasi karena ada saudara, karena tanpa saudara akan susah, dan sulit untuk masuk ke Malaysia. Jaringan dari keluarga yang sudah sukses di Malaysia dan barulah saya bisa ke Malaysia dengan bantuan yaitu memfasilitasi saya di kongsu”.

Stimulus ini, jika seseorang diuntungkan dengan ganjaran yang didapatkan maka memberikan stimulus kepada orang lain untuk melakukan tindakan tersebut. Stimulus yang didapat kurang lebih seperti dengan ganjaran yang didapat masa lalu, tindakan yang dilakukan hampir seperti dengan tujuan untuk mendapatkan ganjaran (Ritzer, 2012). Pengalaman yang didapat oleh keluarga PMI ilegal konstruksi selama bekerja di konstruksi menjadi salah satu informasi yang penting untuk dapat bertahan hidup di Malaysia. Jaringan keluarga dan jaringan perasaan terus terjalin hingga kelak PMI ilegal konstruksi berada di Indonesia. Kemudian jaringan keluarga memberikan keamanan, ekonomi dan psikologis PMI ilegal konstruksi. Dengan ketiga fungsi yang didapat oleh PMI ilegal konstruksi tersebut maka PMI ilegal konstruksi dapat bertahan hidup, tinggal dan bekerja di Malaysia secara ilegal. Jaringan keluarga PMI ilegal konstruksi merupakan jaringan yang cukup dominan dalam terjadinya migrasi PMI ilegal konstruksi di Malaysia. Bapak DN dan MR (12/09/2017) “kekeluargaan sangat kuat kita dibantu jika bermasalah dengan keuangan”. Jaringan ini sangat kuat ikatannya, dan arus informasi sangat cepat didapatkan oleh setiap anggota jaringan keluarga. Informasi yang didapatkan adalah informasi yang valid, tidak mungkin ada keluarga PMI ilegal konstruksi memberikan informasi yang salah kepada keluarga lainnya. Keluarga dalam hal ini tidak hanya keluarga yang terjalin atas satu darah melainkan jaringan keluarga atas dasar persamaan nenek moyang. Jawa Timur, Jawa Tengah dan NTT adalah memiliki kesukuan sendiri yang setiap suku memiliki ikatan yang sangat kuat. Jaringan kekeluargaan seperti yang terjadi antara Bapak AMD dengan Ibu MR, mereka adalah bersaudara dan sama-sama bekerja di konstruksi. Dua saudara ini sudah mendapatkan jodoh di Kongsu. Kedua bersaudara ini mendapatkan jodoh di kongsu dan sudah memiliki anak di kongsu. Jaringan kekeluargaan ini setidaknya bagi para migran memberikan keuntungan baik secara ekonomi, perlindungan, sosial dan informasi. Karena keluargalah yang paling tepat untuk mendapatkan semua hal tersebut. Kemungkinan kecil terjadi penipuan PMI ilegal konstruksi. Sebab sering kali PMI ilegal yang tidak memiliki keluarga ditipu oleh menkong dan agen.

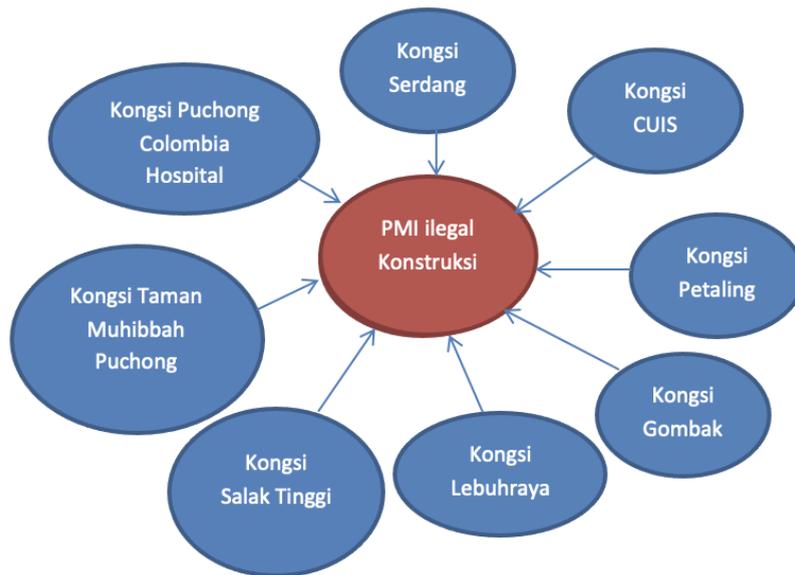
2. Pembahasan: Sistem Jaringan Sosial PMI ilegal Konstruksi

Jaringan PMI ilegal konstruksi di Malaysia terjadi di beberapa Kongsy yaitu Kongsy Serdang, Kongsy Cuis, Kongsy Petaling, Kongsy Gombak, Kongsy Lebuhraya, Kongsy Salak Tinggi, Kongsy Taman Muhibbah Puchong, Kongsy Puchong Colombia Hospital, dari lokasi tersebut peneliti menemukan kasus-kasus PMI ilegal konstruksi. Kongsy adalah tempat tinggal tenaga kerja Indonesia atau rumah semi permanen yang terbuat dari papan triplek atau peti kemas (dari perusahaan) yang dibuat oleh PMI ilegal konstruksi atau disediakan oleh perusahaan. Lokasi Kongsy dekat dengan bangunan tempat bekerja PMI ilegal konstruksi dengan tujuan untuk keamanan PMI ilegal. PMI legal konstruksi dan PMI ilegal konstruksi dalam proses keamanan berbeda, ada beberapa Kongsy PMI ilegal dan PMI legal tidak terlalu jauh berbeda dalam segi kondisi keamanan. Seperti terjadi di salah satu Kongsy, PMI legal juga tetap bersembunyi untuk keamanan mereka jika ada razia dari pihak kepolisian, bagaimana tidak proses tetap seperti PMI legal akan dicari-cari kesalahan dan tetap akan diinterogasi dan akhirnya penyelesaiannya dengan uang. Dengan begitu PMI legal konstruksi dirugikan. Hal ini lah yang membuat PMI legal konstruksi merasa dirugikan secara ekonomi. Uang yang harus dikeluarkan yaitu pembayaran uang permit yang cukup besar dalam setahun sampai 3.000 ringgit atau Rp. 9.000.000 yang harus dibayarkan kepada pemerintah Malaysia untuk memperpanjang permit yang dimiliki. Karena mahal maka sering kali PMI legal konstruksi tidak memperpanjang dan akhirnya menjadi PMI ilegal.

Jaringan sosial PMI ilegal konstruksi menghubungkan sistem sosial yang ada di Kongsy, yaitu menghubungkan aktor-aktor PMI ilegal konstruksi, Kongsy-Kongsy dalam suatu kelompok yang terikat atas dasar nilai-nilai kepentingan, seperti pekerjaan. Dari hasil temuan bahwa juga terjadi hubungan antara menkong disatu Kongsy dengan Kongsy lain, karena jika kontrak kerja sudah selesai maka menkong harus mencari tempat kerja baru, dan hal tersebut membutuhkan jaringan menkong dengan perusahaan dan menkong dengan agen, menkong dengan PMI ilegal konstruksi. Hubungan yang terjalin antara menkong adalah hubungan kepentingan PMI ilegal konstruksi untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan, dengan bidang pekerjaan berbagai macam keahlian. Menkong dapat memegang tenaga kerja berbagai keahlian seperti cat, plester, perkayuan, pemasangan steger dan lainnya. Setiap keahlian dipegang oleh kepala yang berfungsi untuk mengkoordinir setiap keahlian. Seperti yang dilakukan oleh Bapak PMD umur 40 tahun asal Probolinggo, yang bekerja sebagai kepala cat. Bapak PMD mengkoordinir setiap pekerjaan yang berkaitan dengan pengecatan. Jaringan sosial PMI ilegal konstruksi bertujuan untuk menginformasikan setiap sumber-sumber pekerjaan yang ada di Malaysia. Disamping menginformasikan sumber-sumber pekerjaan jaringan sosial ini juga memiliki peran penting bagi PMI ilegal, yaitu memberikan kenyamanan tempat tinggal dan bekerja bagi PMI ilegal konstruksi. Bapak AF (12/09/2017) “kita merasa aman disini karena kita akan dibantu untuk tempat persembunyian oleh perusahaan. Semua teman-teman sangat baik. Kita juga membayar uang 50ringgit untuk keamanan”. Karena ketika PMI ilegal konstruksi berada di satu Kongsy maka keamanannya dijamin oleh polisi setempat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak MHMD adalah PMI asal Bawean beliau adalah menkong yang memiliki 70 anak buah atau pekerja. Sebagian besar

pekerja yang dia miliki adalah ilegal. Hasil temuan bahwa Bapak MHMD sebagai menkong memiliki peran yang sangat penting, yaitu menjalin jaringan dengan. Perusahaan, PMI ilegal konstruksi, dan polisi setempat dengan tujuan untuk keamanan pekerja konstruksi ilegal terjamin. Jika terjadi permasalahan antara PMI ilegal konstruksi maka menkong dapat melakukan pendekatan dengan oknum polisi. Oknum polisi setempat cukup diajak diskusi di beri uang kopi, uang makan mereka langsung pergi, ungkap Bapak MHMD. Tetapi hal tersebut sebenarnya sangat merugikan PMI ilegal konstruksi. PMI ilegal konstruksi diperas dengan memberikan sejumlah uang, jika tidak memberikan sejumlah uang yang diinginkan maka PMI ilegal konstruksi dipenjarakan. Jika dipenjarakan maka urusan semakin rumit. Lebih baik membayar sejumlah uang daripada harus berurusan di Kantor polisi dan tidak mendapatkan upah. Melainkan mengeluarkan waktu dan uang untuk mengurus semuanya. Satu sisi keberadaan mereka adalah PMI ilegal konstruksi, tetapi disisi lain mereka harus mempertahankan diri untuk dapat bertahan hidup, tinggal dan bekerja dan mendapatkan upah sesuai dengan yang diinginkan dalam keadaan ilegal. Hal tersebut dapat merugikan negara tujuan secara ekonomi, yaitu tidak melakukan pembayaran pajak atas pekerjaan, hanya mengambil uang dari Negara tujuan. Kondisi tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius di Malaysia. Maka untuk mengatasi masalah tersebut pihak pemerintah Malaysia membentuk berbagai macam program diantaranya pendataan PMI ilegal di Malaysia yaitu dengan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja asing yang ilegal untuk dapat melaporkan diri ke pihak imigrasi dengan membuat i-KAD.

Jaringan PMI ilegal konstruksi di Malaysia terjadi di level mikro, yaitu pekerja konstruksi di Kongsinya dan ketika keberangkatan ke Malaysia. Skema jaringan sosial yang terjalin diantara PMI ilegal konstruksi yang ada di setiap Kongsinya. Jaringan yang terjadi di skema 5.1 adalah jaringan yang berada di level mikro, yang terjalin karena adanya hubungan kepentingan, perasaan dan keluarga dan pemanfaatan oleh PMI ilegal konstruksi. Jaringan ini sengaja dibentuk oleh PMI ilegal konstruksi dengan tujuan untuk dapat bertahan hidup di Malaysia. Setiap PMI ilegal konstruksi terhubung dengan aktor-aktor lain yang ada di Kongsinya. Hal ini dilakukan oleh PMI ilegal konstruksi untuk mendapatkan informasi dan manfaat sosial ekonomi. Meskipun jaringan yang dibentuk oleh PMI ilegal konstruksi cukup lemah tetapi jaringan ini sangat berarti bagi PMI ilegal konstruksi, sebagai jaringan awal PMI ilegal konstruksi di Malaysia selain jaringan keluarga. Namun pembentukan jaringan pada level mikro ini lebih mengutamakan kepentingan individu PMI ilegal konstruksi dibanding level makro yang mementingkan kepentingan kelompok. Setiap Kongsinya terdapat jaringan-jaringan yang lebih besar atau berada pada level makro yang secara ruang gerak PMI ilegal konstruksi lebih luas. Skema ini adalah temuan dan dimodifikasi oleh peneliti sebagai berikut:

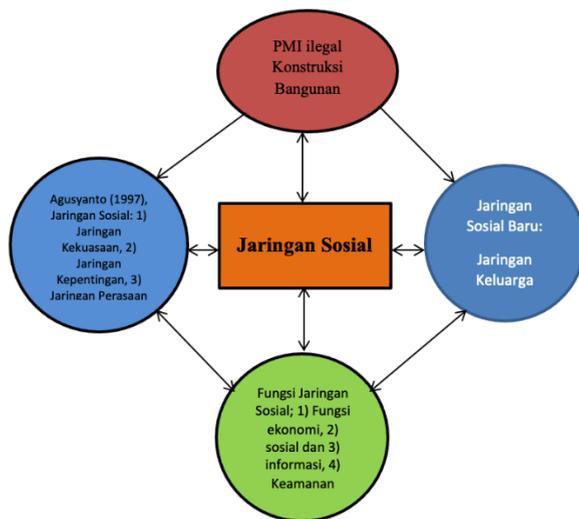


Skema 3: Jaringan PMI Ilegal Konstruksi di Level Mikro sebagai Aktor (temuan dan dimodifikasi oleh peneliti, 2017)

Skema di atas menggambarkan jaringan yang dimiliki oleh PMI ilegal konstruksi. PMI ilegal konstruksi sebagai *star*, dalam artian PMI ilegal konstruksi tenaga kerja yang dicari oleh perusahaan atau setiap kongsinya. PMI ilegal konstruksi melakukan hubungan dengan teman, keluarga dan menkong yang ada di setiap Kongsinya. Hubungan yang terjadi adalah hubungan individual PMI ilegal konstruksi sebagai aktor yang berada pada level mikro hingga pada level makro.

Disamping itu peneliti menemukan sebuah jaringan yang dimiliki oleh menkong. Di setiap Kongsinya memiliki jaringan menkong dan jaringan tersebut seperti jaringan yang ada di Kongsinya-Kongsinya yang lainnya. Menkong memiliki peran cukup besar bagi PMI ilegal konstruksi dalam mendapatkan pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu SA dan Bapak HTM (04/09/2017) “Kerani adalah orang jaga bangunan yang akan membantu jika terjadi kecelakaan, perlakuan sama terhadap korban kecelakaan kerja, sedangkan menkong berperan aktif dalam mendapatkan botongan pekerjaan, semua informasi mengenai kerja didapat dari bapak PMD. Setiap menkong di Kongsinya memiliki jaringan kekuasaan, kepentingan, perasaan dan keluarga. Jaringan yang terjalin antara menkong dengan PMI ilegal konstruksi yaitu jaringan menkong dengan PMI ilegal konstruksi, jaringan menkong dengan Perusahaan, menkong dengan tokoh, menkong dengan oknum polisi. Migrasi tenaga kerja ilegal konstruksi di Malaysia adalah sebuah proses migrasi internasional, yaitu adanya *push* faktor dari Negara Indonesia, *pull* faktor yang terdapat di Malaysia, Kemudian dalam bermigrasi adanya rintangan antara (penghambat) PMI ilegal konstruksi dalam melakukan migrasi dan faktor-faktor individual aktor PMI ilegal konstruksi. Adapun migrasi yang dilalui oleh PMI ilegal konstruksi pada tahun 1988 yaitu melalui batam dengan membutuhkan perjalanan berminggu-minggu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak MHMD (22/09/2017) “masuk Malaysia diperjalanan dari boyan sampai jambi, lalu ke batam dan masuk ke johor selama 1 bulan lebih”. Jarak yang jauh akan menjadi rintangan tersendiri bagi para PMI ilegal konstruksi. Namun yang menarik dari migrasi

PMI ilegal konstruksi ini adalah bagaimana PMI ilegal konstruksi dapat sampai ke Malaysia dengan aman dan tanpa melalui proses administrasi. Walaupun ada terkadang PMI ilegal mengalami masalah. Dari skema 4 bahwa jaringan sosial yang digunakan oleh PMI ilegal konstruksi yaitu jaringan kekuasaan, kepentingan dan perasaan, namun jaringan keluarga juga berperan dalam migrasi tenaga kerja ilegal di Malaysia. Adapun jenis jaringan dapat dilihat pada skema dibawah ini:



Skema 4: Jenis Jaringan Sosial Baru PMI Ilegal Konstruksi

Kemudian PMI ilegal konstruksi di Kongsinya memanfaatkan jaringan untuk ekonomi, sosial dan informasi mengenai keamanan selama tinggal dan bekerja di Malaysia, dan yang terpenting adalah untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Jenis jaringan sosial yang terjadi diantara PMI ilegal konstruksi dari satu Kongsinya ke Kongsinya lain adalah jenis kekuasaan, kepentingan, perasaan dan yang paling terpenting bagi PMI ilegal konstruksi adalah jaringan keluarga. Jaringan keluarga adalah jaringan pertama PMI ilegal konstruksi dalam melakukan migrasi ke Malaysia. Diantara keempat jaringan terbangun tersebut, jaringan yang paling dominan dari jenis jaringan PMI ilegal konstruksi adalah jaringan perasaan dan keluarga. Jaringan perasaan PMI ilegal konstruksi merasa kasihan kepada setiap rekan sesama PMI ilegal konstruksi yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Sehingga dengan kondisi tersebut menimbulkan rasa kasihan dengan memberikan perhatian kepada PMI ilegal konstruksi yang baru datang.

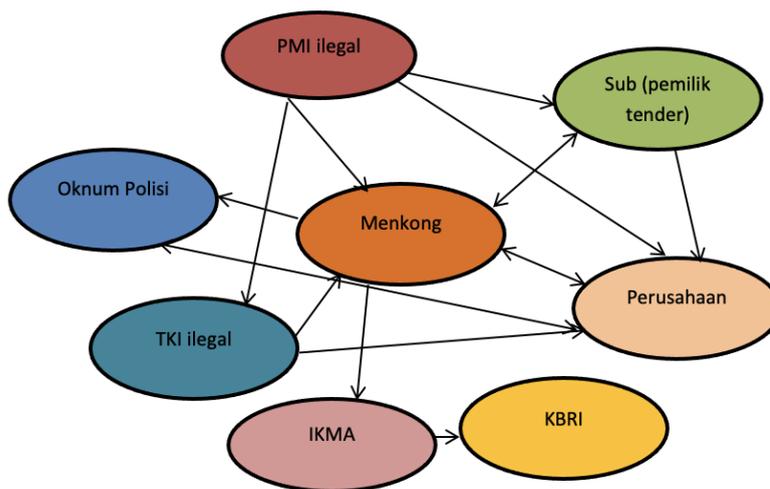
Pentingnya melihat derajat dan pola relasi yang terjalin di Kongsinya, setiap aktor memiliki peran dan tujuan masing-masing untuk terwujudnya keinginan aktor. Sebagai PMI ilegal konstruksi relasi ini sangat berarti, sebab dari relasi-relasi inilah nantinya PMI ilegal konstruksi mendapatkan manfaat dari setiap relasi yang dijalin, walaupun terkadang PMI ilegal konstruksi tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari relasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kondisi yang kosong membuat PMI ilegal konstruksi tidak terlalu di perhatikan secara sosial, melainkan PMI ilegal konstruksi mencari sendiri. Menurut Granovetter (1985:490) yang dikutip oleh (Ritzer & Goodman, 2004) bahwa pusat perhatian jaringan yaitu pada struktur mikro hingga ke makro, kemudian bahwa hubungan ditingkat mikro “melekat” dalam hubungan pribadi yang konkret yang berlandaskan pada gagasan bahwa setiap aktor (individu atau

kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Namun berdasarkan temuan dilapangan bahwa jaringan yang terjadi yaitu berupa jaringan kekuasaan, kepentingan, perasaan dan keluarga.

Pemerintah Malaysia seakan membuka peluang kerja dengan dimungkinkannya seseorang yang tertangkap karena kerja di Malaysia dengan visa kunjungan, bila ingin tetap bekerja di Malaysia maka dapat dibuatkan visa kerja dengan membayar sejumlah uang tertentu. Para pendatang di Malaysia yang tidak berdokumen, atau dokumennya tidak lengkap (dikenal dengan istilah Pendatang Asing Tanpa Izin atau PATI) sebenarnya diketahui oleh Pemerintah Malaysia, namun Pemerintah Malaysia seolah menutup mata terhadap keberadaan PATI tersebut, atau bahkan mungkin adanya sindikasi orang Malaysia itu sendiri sehingga meskipun razia dan deportasi sering dilakukan, namun PATI ini masih terus bermunculan. Hal ini dapat juga terjadi, atas desakan para pengusaha, Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan “pemutihan” dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan atau majikannya untuk mendaftarkan tenaga kerjanya yang telah mendapat jaminan perusahaan atau majikan. Dengan adanya jaminan ini maka PMI ilegal konstruksi tersebut dapat mengurus dokumen kerja tanpa harus pulang ke negara asalnya, dengan demikian PMI tersebut menjadi sah di mata hukum Malaysia, meskipun di mata hukum Indonesia PMI tersebut adalah ilegal. Penegakkan hukum tentu tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri namun harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan aparat (Arianto, 2014). Walaupun hukum sudah dibuat namun sangat mudah untuk dilanggar dan tidak menjalankan peraturan yang telah dibuat. Gratifikasi adalah perbuatan dilarang oleh setiap Negara, tetapi hal ini terjadi di Kongsi PMI ilegal konstruksi.

Berada di Malaysia tanpa dokumen adalah resiko besar, membuat PMI ilegal konstruksi merasa tidak nyaman selama bekerja dan tinggal di Malaysia. PMI ilegal memanfaatkan jaringan hanya sebatas ekonomi dan keamanan PMI ilegal konstruksi ketika tinggal dan bekerja di Kongsi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak YNT beliau melakukan jaringan karena ingin merasa aman berada di Kongsi, “jaringan saya mengikat dengan mencari tenaga kerja dan keamanan”. Jika tidak memiliki jaringan PMI ilegal konstruksi akan mengalami kesulitan untuk dapat bertahan hidup di Kongsi dan tidak akan lama berada di Malaysia, karena informasi ada di jaringan sosial PMI ilegal konstruksi. Jika tidak PMI ilegal konstruksi tidak mampu bertahan dan untuk mendapatkan informasi mengenai keamanan dan pekerjaan di Malaysia yang akurat. Keberadaan PMI ilegal konstruksi sangat berarti dan bagi oknum penguasa adalah keuntungan dengan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada di Kongsi. Sebenarnya PMI ilegal merasa diperas oleh pihak penguasa, yaitu dengan memberikan iuran yang telah ditetapkan oleh perusahaan, oknum polisi dan menkong sebesar 50 ringgit perbulan. Namun uang keamanan tersebut tidak memberikan keamanan yang maksimal, jika ada razia oleh pihak migrasi Malaysia maka PMI ilegal konstruksi tetap melakukan melarikan diri ke hutan. Persembunyian tersebut tidak hanya dilakukan oleh PMI ilegal konstruksi tetapi PMI legal konstruksi pun melakukan persembunyian. Dengan mencari celah kesalahan para PMI legal yang penyelesaiannya cukup rumit itu kondisi PMI legal konstruksi sama dengan PMI ilegal konstruksi. PMI legal tetap akan di introgasi. Bagi negara tujuan keberadaan PMI ilegal sangat merugikan karena

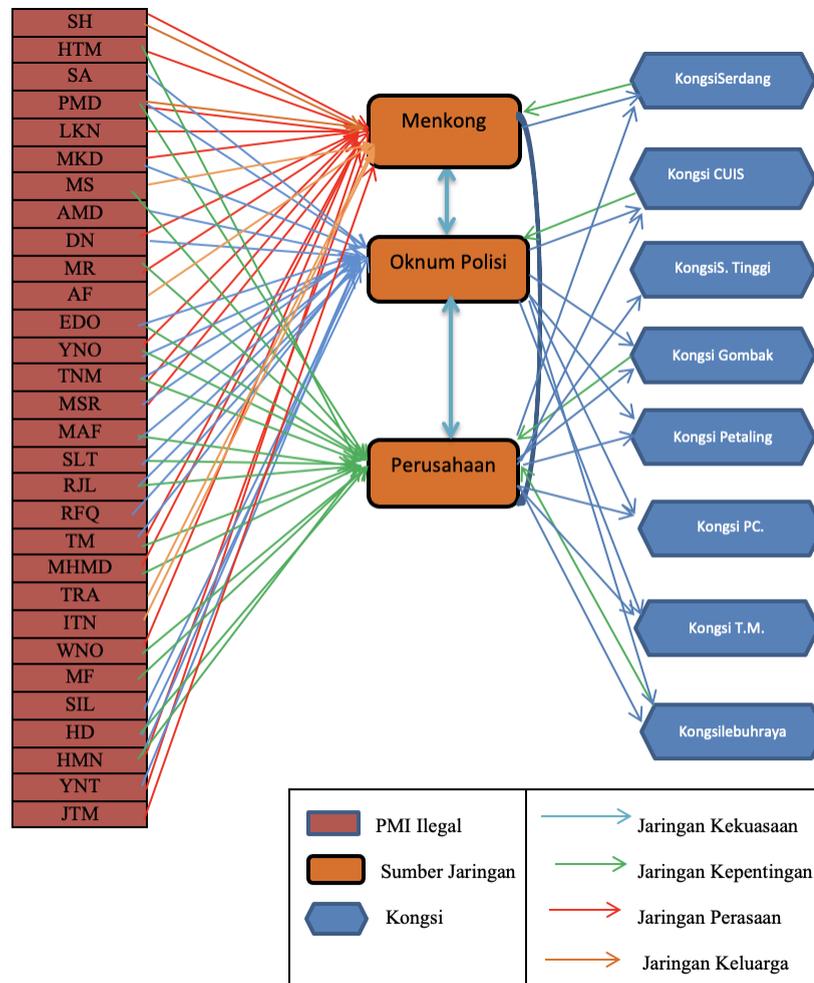
tidak harus membayar izin dan sebagainya, namun secara pembangunan wilayah akan diuntungkan. Dalam merespons kebijakan Malaysia terkait *sweeping* dan *razia* yang dilakukan oleh pihak migrasi dan polisi Malaysia, PMI ilegal memperkuat jaringan dengan menginformasikan ketika akan ada *sweeping* dan *razia* yang dilakukan oleh pihak migrasi. Adapun bentuk pola dan derajat jaringan di level makro PMI ilegal konstruksi, yaitu:



Skema 5: Pola dan derajat hubungan jaringan PMI yang terjadi di Malaysia

Skema di atas adalah jaringan sosial yang lebih besar yang terjadi di level makro di Malaysia. Namun jaringan tersebut bagi aktor PMI ilegal konstruksi sebagai sumber-sumber yang tersedia dan harus dimanfaatkan, membentuk hubungan-hubungan dengan perusahaan, menkong dan pihak kepolisian di sekitar Kongs, dan memanfaatkan jaringan sosial yang ada. Jaringan diatas setiap aktor menjalin hubungan masing-masing dengan tujuan untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia disetiap jaringan sosial. Adapun menurut dalam penelitian ini ditemukan bahwa jaringan sosial adalah jaringan sosial terpadu yang setiap aktor-aktor saling bersosialisasi. Menurut Ronald Burt (1982) menyatakan bahwa tindakan-tindakan alternatif dievaluasi secara independen oleh para aktor terpisah sehingga evaluasi itu dibuat tanpa acuan kepada aktor lain dan aktor yang terpisah dalam suatu sistem yang mempunyai kepentingan interdependen karena norma yang dihasilkan oleh para aktor saling bersosialisasi. Jaringan sosial TKI ilegal konstruksi adalah berperan aktif dalam setiap migrasi TKI ilegal konstruksi di Malaysia. Jaringan sosial ini memberikan dampak terhadap perkembangan TKI ilegal konstruksi secara makro dan secara kolektivitas pencapaian tujuan tersebut dilakukan secara ilegal. Sehubungan dengan hal tersebut TKI ilegal konstruksi adalah migran yang telah melanggar administrasi ke imigrasian baik di daerah asal maupun didaerah tujuan. Dengan begitu memberikan dampak terhadap kedua Negara. Kajian tentang jaringan sosial migrasi TKI ilegal konstruksi ini melahirkan diskusi secara sosiologis dengan fokus pada tema sosiologi migrasi dan sosiologi ketenagakerjaan. Adapun dapat digambarkan jaringan sosial yang dipilih oleh PMI ilegal konstruksi, yaitu:

Skema 6: Jaringan Sosial PMI ilegal Konstruksi Berdasarkan Tipe Jaringan



Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Dari sosimetri di atas jaringan sosial yang dipilih oleh setiap informan adalah jaringan sosial keluarga, jaringan perasaan, jaringan kekuasaan dan jaringan kepentingan. Diantara keempat jaringan dominan adalah kekuasaan, jaringan yang dipilih oleh PMI ilegal konstruksi merupakan pilihan yang dianggap oleh PMI ilegal memberikan fungsi-fungsi yang berlebih terhadap dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Jika ada informasi tentang pekerjaan konstruksi maka PMI ilegal konstruksi lainnya memberikan informasi melalui group-group di facebook, Whatsap dan melalui jaringan pribadi atau teman-teman dekat. Sedangkan jaringan keluarga juga tidak kalah penting bagi PMI ilegal konstruksi di Malaysia. Jaringan keluarga adalah jaringan pertama PMI ilegal konstruksi yang terjalin sebelum dan sesudah keberangkatan PMI ilegal konstruksi, jaringan ini permanen. Dengan adanya keluarga di Malaysia maka proses migrasi aman dan tidak ada penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan PMI ilegal konstruksi dengan melakukan pemerasan. Jaringan keluarga migran PMI ilegal konstruksi memberikan fasilitas arus keberangkatan tenaga kerja konstruksi di Malaysia yaitu berupa bantuan tempat tinggal

sementara setelah berada di Malaysia dan memberikan bantuan untuk dapat masuk ke Malaysia dengan memberikan informasi jalur keberangkatan yang harus ditempuh calon PMI ilegal konstruksi, disamping itu juga sumber modal dan informasi pekerjaan konstruksi di Malaysia. PMI ilegal konstruksi tidak hanya membutuhkan jaringan kepentingan, perasaan, kekuasaan tetapi juga membutuhkan jaringan keluarga.

Keamanan PMI ilegal konstruksi ketika berada di Kongsu pun akan terjamin dibanding ketika dia sendiri berada di Kongsu dan belum ada yang mereka kenal, tetapi semua PMI ilegal konstruksi di Kongsu memiliki perasaan kasihan kepada setiap PMI ilegal konstruksi yang merantau ke Malaysia dan belum ada orang yang mereka kenal. Jaringan sosial PMI ilegal konstruksi ini sangat penting bagi PMI ilegal yang ingin mencapai tujuannya. Menurut Granovetter dalam (Ritzer, 2012) bahwa ikatan yang terjalin dalam jaringan meskipun bersifat lemah sangat penting bagi para aktor. Meskipun PMI ilegal konstruksi masih baru berada di Kongsu dan aktor belum memiliki jaringan yang kuat, maka jaringan yang bersifat lemah ini sangat membantu PMI ilegal konstruksi, terutama dalam memfasilitasi tempat tinggal. Setelah beberapa tahun berada di Kongsu dan dengan pengalaman, PMI ilegal konstruksi mampu dapat *survive* di Malaysia dan memiliki jaringan yang luas. Dengan jaringan yang kuat meningkatkan status PMI ilegal konstruksi menjadi menkong, mengambil sendiri borongan dari perusahaan.

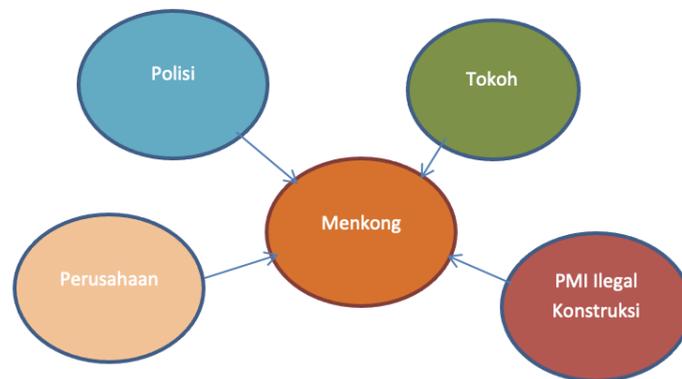
Disamping jaringan sosial untuk masuk ke pasar kerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi adalah jaringan penduduk setempat agar mendapatkan dukungan sosial di Negara tujuan, kemudian sifat konstruksi yang sangat tidak terorganisir pasar tenaga kerja (Fernandes & G.D, July 2011). Jaringan penduduk setempat kemungkinan kecil didapatkan oleh PMI ilegal konstruksi karena keberadaan mereka yang ilegal. Keberadaan jaringan PMI ilegal konstruksi di Malaysia begitu kompleks karena setiap anggota diberikan kebebasan untuk dapat bergabung di Kongsu-Kongsu yang ada di Malaysia. Jika PMI ilegal konstruksi tidak merasa nyaman berada di Kongsu dan upah yang kecil maka dia bebas untuk berpindah ke Kongsu lain dan memiliki menkong baru, hal ini terjadi jika menkong yang dimiliki tidak baik atau gaji yang didapatkan terlalu kecil, perpindahan ini terjadi karena mereka tidak ada ikatan atau nilai-nilai yang mengikat yang dapat mengikat mereka dan menetap dalam di satu menkong adalah kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Berbeda dengan PMI legal konstruksi, mereka sulit untuk berpindah sebab ada sebuah kesepakatan atau tanda tangan kontrak dengan perusahaan atau tanda tangan dengan agen yang bersangkutan dalam bentuk perjanjian, yaitu sebelum habis kontrak belum bisa berpindah menkong dan berpindah perusahaan. Jika perjanjian dilanggar maka dokumen yang dipegang oleh agen tidak dikembalikan, dengan dokumen yang dipegang oleh agen, PMI legal menjadi kosong. Sehingga PMI legal konstruksi tidak memiliki kebebasan untuk memilih tempat bekerja dan memiliki menkong baru sesuai dengan keinginan PMI konstruksi legal.

Tidak adanya keterikatan PMI ilegal konstruksi yang membuat jaringan tidak dapat bertahan lama, melainkan hanya sebatas kepentingan, kekuasaan PMI ilegal konstruksi dan memanfaatkan untuk mendapatkan ekonomi, sosial, informasi dan keamanan. Berbeda dengan jaringan sosial yang terbangun atas dasar perasaan dan kekeluargaan. Jaringan perasaan dan keluarga ini, cenderung bertahan lama, hingga

kelak PMI ilegal konstruksi berada di daerah masing-masing. Karena jaringan perasaan dan kekeluargaan adanya nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada setiap aktor PMI ilegal konstruksi. Nilai-nilai cinta dan kasih sayang ini dapat diberikan dalam bentuk perhatian sesama PMI ilegal konstruksi, seperti dalam hal informasi yang diberikan adalah valid.

Menkong memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anggotanya. Karena tugas menkong adalah mengatur pekerjaan dan mengurus PMI ilegal konstruksi yang berada di Kongsinya dan melakukan hubungan kerja dengan menkong, kemudian mengurus PMI ilegal konstruksi yang bermasalah seperti kecelakaan kerja, pemulangan dan masalah upah pekerja di Kongsinya. Disamping itu juga menkong memiliki jaringan yang cukup luas yaitu melakukan hubungan dengan menkong yang ada di Kongsinya lainnya. Hubungan dengan perusahaan dan melakukan hubungan dengan tokeh. Adapun skema jaringan yang terjadi di Kongsinya-Kongsinya, menkong menjadi pusat informasi atau dapat dikatakan *star* dalam hubungan sosial yang terjalin, adalah:

Skema 7: Jaringan Menkong (temuan dan dimodifikasi oleh peneliti, 2023)



Dari setiap Kongsinya terjalin hubungan yang didasarkan atas kekuasaan, kepentingan dan perasaan PMI ilegal konstruksi. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan oleh PMI ilegal konstruksi sebagai sumber informasi, ekonomi, dan sosial, disamping itu jaringan sosial yang terbangun untuk mendapatkan rasa aman PMI ilegal di setiap Kongsinya, dengan berada di satu lokasi dengan status yang seperti PMI ilegal konstruksi ikatannya lebih kuat karena mereka berada dalam satu kondisi yang sama. Sehingga ketika ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau keimigrasian maka mereka bersama-sama pergi ke hutan untuk mencari perlindungan setelah beberapa hari di hutan barulah mereka kembali ke Kongsinya. Pada dasarnya jaringan ini memiliki enam prinsip menurut Welman (1983) yang dikutip oleh (Ritzer & Goodman, 2004) yaitu:

- 1) ikatan para aktor terjadi secara simetris,
- 2) ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas, dan
- 3) ikatan sosial ini menimbulkan berbagai jenis jaringan non acak,
- 4) adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara individu.

- 5) Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas tidak akan terdistribusikan secara tak merata
- 6) Distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas menyebabkan kerjasama maupun kompetisi.

Keberadaan TKI ilegal konstruksi yang sulit untuk dideteksi, sudah selayaknya pemerintah Indonesia memberikan kontrol kepada TKI ilegal konstruksi di Malaysia dengan membentuk team khusus untuk melakukan pengontrolan atau pendataan TKI ilegal konstruksi di Malaysia. Kemudian pemerintah Indonesia membuat sebuah program untuk pendataan TKI ilegal konstruksi di Malaysia, dengan begitu setidaknya mengurangi TKI ilegal di Malaysia dan dapat mendeteksi keberadaan TKI ilegal khususnya TKI ilegal konstruksi. TKI ilegal konstruksi adalah orang yang melanggar batas administrasi suatu Negara, maka dari itu pendekatan yang dilakukanpun tidaklah berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, melainkan dengan pendampingan yang lebih *humanize*. Untuk penyalur atau agen TKI ilegal konstruksi, sebagai penyalur yang resmi seharusnya agen memberikan pelayanan yang profesional, hingga hak-hak TKI ilegal konstruksi terpenuhi dan tanggung jawab sebagai penyalur terselesaikan hingga TKI ilegal konstruksi pulang ke Indonesia. Penipuan adalah tidak dibenarkan dalam setiap tindakan dan merupakan pelanggaran hukum, yaitu merugikan TKI ilegal konstruksi. Kemudian tidak menahan dokumen yang dimiliki oleh TKI ilegal konstruksi, hal tersebut dapat mengurangi bertambahnya TKI ilegal konstruksi. Sebab perubahan status disebabkan semua dokumen seringkali di tahan oleh penyalur atau agen. Untuk TKI ilegal konstruksi, sebagai pekerja pendatang di Negara orang. Sebaiknya TKI ilegal konstruksi segera melakukan pelaporan. Kemudian bagi TKI ilegal konstruksi yang sudah bekerja dan menetap di Malaysia melakukan pelaporan dengan membuat i-KAD di Kantor Imigrasi Malaysia. Sebab dengan TKI ilegal konstruksi melakukan pelaporan dan memiliki i-KAD maka keberadaan TKI terdeteksi dan menjadi legal, dan bekerjalah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh kedua Negara. Semua peraturan yang dibuat adalah semata untuk kebaikan TKI ilegal konstruksi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jaringan social PMI ilegal konstruksi di Malaysia. Jaringan sosial PMI ilegal konstruksi di Malaysia sengaja dibentuk oleh aktor PMI ilegal konstruksi di Kongs, dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan mendapatkan fungsi-fungsi dari jaringan tersebut. Jaringan sosial PMI ilegal konstruksi di Malaysia adalah menjadi salah satu besarnya arus migrasi PMI ilegal konstruksi di Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian hubungan yang terjalin baik hubungan kekeluargaan, hubungan kekuasaan, hubungan kepentingan. Jaringan yang terbentuk adalah salah satu strategi PMI ilegal konstruksi untuk dapat bertahan hidup di Malaysia yaitu tinggal dan bekerja secara ilegal. Temuan peneliti bahwa jaringan sosial baru yaitu keluarga sangat berpengaruh terhadap dorongan aktor untuk melakukan migrasi ke Malaysia secara ilegal. Jaringan sosial yang sudah terbentuk dari beberapa daerah asal PMI ilegal

konstruksi di Kongsy-Kongsy, sehingga jaringan ini semakin besar dan berkembang. Peran PMI ilegal konstruksi yang telah mendapatkan kesuksesan di Malaysia telah memberikan stimulus kepada masyarakat, saudara, teman, dan keluarga untuk menjadi PMI ilegal konstruksi di Malaysia. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak semua informan PMI ingin terbuka dengan identitas mereka, peneliti kesulitan untuk menemukan informan yang benar-benar mau untuk diwawancarai. Sehingga data informan diatas sengaja hanya dengan memberikan inisial, karena PMI ilegal konstruksi tidak mau identitasnya diketahui oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- IOM. (2010). *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia (Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah)*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Mei, L. (2006). *Indonesian Labor Migrants in Malaysia: A Study from China*. Kuala Lumpur: ICS Working Paper No. 2006-11.
- Maksum, A. (2015). *Politik Internasional dan Sumber Masalah Hubungan Indonesia-Malaysia*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nurdin, M. F., Herdiansyah, A. G., & Gunawan, W. (2015). *Globalizing Information Technology: Issues and Challenges in Contemporary Indonesia's Democracy*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- BNP2TKI. (2016). *Data Penempatan dan Perlindungan TKI*. Jakarta: BNP2TKI.
- Butt, L. (2014). Migration, Mobility and Transnational. *CAPI Working*, 1.
- Primawati, A. (2012). Penempatan Tki Masih Dengan Paradigma Komoditas. *INSANI*, ISSN : 0216-0552 | NO. 12.
- Helmi, R. F. (2013). Politik Pemerintah Malaysia dalam Membatasi Kebergantungan pada Pekerja Konstruksi Asing Indonesia. *TINGKAP*, Volume. IX No. 1.
- Pahroji, D., & Singadimedja, H. N. (2012, September-Oktober). Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia Dan Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*, pp. ISSN 1412-86676 Vol. 11 No. 24.
- Shuid, S. (2004). Urbanization and Housing in Kuala Lumpur City Centre :Issues and Future Challenges. *19th EAROPH World Planning and Housing Congress* (pp. 1-12). Melbourne Australia: EAROPH World Planning and Housing Congress.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rinil, I. P., & Tenriajeng, A. T. (2014). Analisis Risiko Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kinerja Eaktu Proyek Pada Bangunan Bertingkat. *Jurnal Desain Konstruksi*, Volume 13 No 2.
- Fernandes, D., & G.D, B. P. (July 2011). Social Networks of Migrant Construction Workers in Goa. *Indian Journal of Industrial Relations*, , Vol. 47, No. 1 , pp. 65-77.
- Mirsel, R. (2004). *Teori Peregerakan Sosial*. Yogyakarta: CV. Langit Aksara.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 2nd Edition*. USA: Sage Publications.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Arianto, H. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Tki Ilegal Di Perbatasan Indonesia – Malaysia (Studi Kasus Di Entikong, Kalimantan Barat) . *Forum Ilmiah*, Volume 11 Nomor 2.
- Agusyanto, R. (1997). *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, H., & Wahyu, R. (2000). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia Bandung .
- Coleman, J. S. (2009). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Safitri, Y. M., & Wahyuni, E. S. (2013). Jaringan Sosial Dan Strategi Adaptasi Tenaga Kerja Migran Asal Lampung Di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Sopsiologi Pedesaan*, 64-77.

- Syafitri, R. (2014). *Peran dan Jaringan Sosial Lembaga Pendidikan Anak Jalanan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Abercrombie, N., Hill, S., & Turner, B. S. (2010). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, Vol. 3, No. 1. (1966), pp. 47-57.
- Mantra, I. B. (2003). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ILO. (2007). *Sekilas Tentang ILO*. Jakarta: Department of Communication dan Public Information .
- Soekanto, S. (1983). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ritzer, G. (2009). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Watson, T. (2003). *Sociology, Work and Industry*. Francis: The Taylor & Francis e-Library.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Cohen, S., & L, P. (2001). *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work*. London: Harvard Business Pres.